



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 72799056

NOTA DINAS

NOMOR PR0304/B/Pb/2026/07

Yth. : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
Hal : Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025 dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab	Judul Bab	Judul subbab
I	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">Latar BelakangTugas dan FungsiStruktur Organisasi dan Sumber Daya ManusiaSarana dan PrasaranaIsu StrategisSistematika Laporan
II	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025Metode PengukuranTarget Kinerja Tahun 2025
III	Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none">Upaya Peningkatan Akuntabilitas KinerjaCapaian KinerjaAnalisis Perbandingan KinerjaAnalisis Realisasi AnggaranEfisiensi Penggunaan Sumber Daya
IV	Penutup	<ol style="list-style-type: none">Simpulan UmumRekomendasi dan Tindak Lanjut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Bina Marga,



Pengecekan Keaslian Dokumen

Erna Wijayanti

Tembusan:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum
- Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025. Laporan Kinerja tahun 2025 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga sebagai wadah untuk menguraikan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan Renstra TA 2020-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah disepakati. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilaksanakan ialah dengan membandingkan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang telah dicapai.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, 15 Januari 2026

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Bina Marga



Erna Wijayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga ("Direktorat PPIBM") merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ("DJPI") di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut dan guna memenuhi indikator capaian kinerja, Direktorat PPIBM mempertajam dengan menyusun rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIBM Tahun Anggaran (TA) 2025–2029.

Berdasarkan Renstra tersebut, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut tercantum anggaran belanja Direktorat PPIBM. Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM tercantum anggaran belanja dalam satu tahun kerja yaitu sebesar Rp. 8.960.826.000,-.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud Direktorat PPIBM dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2025, total paket kegiatan Direktorat PPIBM adalah sebanyak 11 paket kegiatan yang terdiri dari 10 paket swakelola dan 1 paket kontraktual. Berdasarkan *e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum, realisasi anggaran yang berhasil dicapai Direktorat PPIBM terhadap keseluruhan pagu anggaran per tanggal 8 Januari 2026 adalah sebesar Rp. Rp. 6.700.316.000,- dari total pagu sebesar Rp. 8.960.826.000,- atau dengan persentase capaian sebesar 74,77%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil dicapai Direktorat PPIBM terhadap pagu efektif (non blokir) per tanggal 8 Januari 2026 adalah sebesar Rp. Rp. 6.700.316.000,- dari total pagu sebesar Rp. 7.943.497.000,- atau dengan persentase capaian sebesar 84,35%.

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIBM tahun 2025 adalah sebesar 83,82% dan 118% ; dimana artinya Direktorat PPIBM berhasil mencapai dan melebihi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar 72,16% dan 100%. Berikut tabel perbandingan antara capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target PK Revisi 2025	Realisasi
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	100%	118%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Laporan	3 Laporan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dkerjasamakan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%	83,82%
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat PPIBM dan mempengaruhi dalam melakukan penyiapan proyek KPBU sektor Bina Marga, seperti perubahan ruang lingkup proyek, perubahan rencana perusahaan proyek, serta permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU sehingga terdapat beberapa tahapan penyiapan proyek KPBU yang mengalami keterlambatan dari *timeline* yang telah ditargetkan.

Pada tanggal 24-26 November 2025, Direktorat PPIBM telah melaksanakan Audit Eksternal sebagai rangkaian terakhir pelaksanaan kegiatan Audit *Surveillance* II dalam rangka mempertahankan tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dimana sebelumnya Direktorat telah PPIBM berhasil memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 November 2023 dan telah mempertahankan tersertifikasinya SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tahun 2024.

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi	2
I.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
I.3.1 Struktur Organisasi	3
I.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	3
I.4 Sarana dan Prasarana	7
I.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	7
I.4.2 Transformasi Digital	10
I.5 Isu Strategis	12
I.6 Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
II.1 Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	12
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025-2029	14
II.1.3 Program dan Kegiatan	17
II.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	18
II.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	18
II.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	19
II.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	20
II.3 Metode Pengukuran	24
II.4 Target Kinerja Tahun 2025	32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	40
III.2 Capaian Kinerja	43
III.2.1 Analisis Capaian Kinerja	46
III.2.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025	50
III.3 Analisis Perbandingan Kinerja	54
III.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	54
III.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	55
III.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>)	57
III.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	60
III.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	60
III.4.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	61
III.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024	69
III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
BAB IV PENUTUP	73
IV.1 Simpulan Umum.....	73
IV.1.1 Faktor pendukung Keberhasilan.....	74
IV.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan	74
IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	75
.....	76
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Direktorat PPIBM Tahun 2025	4
Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	6
Tabel I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Status Pegawai.....	7
Tabel I.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	7
Tabel I.7 Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Direktorat PPIBM	8
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal.....	18
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Akhir	19
Tabel II.3 Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM	20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Awal.....	20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama.....	21
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua.....	22
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Revisi Ketiga	22
Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir.....	23
Tabel II.8 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025.....	25
Tabel II.9 <i>Cascading</i> Kinerja Direktorat PPIBM	31
Tabel II.10 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025	32
Tabel II.11 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2024 dengan Target Capaian Kinerja TA 2025	33
Tabel II.13 Sandingan Target Kinerja Renstra Direktorat PPIBM TA 2025 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025.....	38
Tabel III.1 Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 Direktorat PPIBM	41
Tabel III.2 <i>Cascading</i> Direktorat PPIBM Tahun 2025	44
Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Direktorat PPIBM Berdasarkan RO.....	45
Tabel III.4 Capaian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025.....	46
Tabel III.5 Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPIBM TA 2025	48
Tabel III.6 Capaian Proyek KPBU Tahap Penyiapan Sektor Bina Marga TA 2025	50
Tabel III.7 Capaian Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Siap Dikerjasamakan TA 2025	53
Tabel III.8 Perbandingan Kinerja Direktorat PPIBM dengan Tahun Sebelumnya.....	54
Tabel III.9 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Bina Marga Periode 2025-2029	55

Tabel III.11 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029	57
Tabel III.10 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.....	58
Tabel III.10 Target Kinerja LKPP Tahun 2025-2029.....	60
Tabel III.12 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIBM pada Tahun Anggaran 2025.....	61
Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Trans Papua	1
Gambar II-1 Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)	12
Gambar III-1 Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau	40
Gambar III-2 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan	67
Gambar III-3 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik.....	67



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Asas akuntabilitas yang mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Salah satu bentuk Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga ("Direktorat PPIBM") merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIBM atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIBM ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Gambar I-1 Trans Papua

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025 dibuat dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian atas rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIBM dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Direktorat PPIBM tahun 2025 juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri PAN RB

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIBM untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

I.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat PPIBM adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIBM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum.

B. Tugas

Direktorat PPIBM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIBM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
3. Pengusulan rencana program, kegiatan dan anggaran di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
4. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
5. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur bina marga;
6. Pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
7. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bina marga;
10. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko, sistie manajemen anti penyuapan, dan zona integritas Direktorat; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIBM didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas:

- A. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I;
- B. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II;
- C. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III; dan
- D. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PPIBM diperlihatkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1-2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIBM didukung oleh 51 pegawai yang terdiri pegawai 26 laki-laki dan 25 perempuan dengan rincian serta pengelompokan pegawai sebagai berikut:

I.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan jenisnya yang meliputi Jumlah PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung Individual yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIBM berdasarkan jenisnya.

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Direktorat PPIBM Tahun 2025

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	13	25
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10	4	14
3.	Calon Pegawai Negeri Sipil 2024	3	3	6
4.	Tenaga Pendukung Individual (TPI)	1	5	6
	Total	26	25	51

Sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan struktur pegawai di Direktorat PPIBM yang disebabkan antara lain:

1. Pegawai yang sedang melakukan karya siswa sebanyak 2 (dua) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai PPIBM yang berstatus PPNPN beralih menjadi PPPK sebanyak 6 (enam) orang.

I.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan golongan dan kelompok jabatan yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIBM berdasarkan golongan dan kelompok jabatan.

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	IV/B	-	3	3
2	IV/A	3	1	4
3	III/D	3	2	5
4	III/C	-	2	2
5	III/B	6	5	11

6	III/A	13	10	23
7	II/C	-	1	1
8	III/B	-	1	1
9	III/A	1	-	1
Total		26	25	51

Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	-	1	1
2	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I	1	-	1
3	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II	-	1	1
4	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III	1	-	1
5	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	1	1
6	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya	1	1	2
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	1	1
8	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda	2	1	3
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	2
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	3	4
11	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4	1	5
12	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	-	1	1
13	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
14	Penata Layanan Operasional	-	1	1
Total PNS		12	13	25
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
1	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1	-	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	1	5
3	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	1	1	2

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
4	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	-	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	-	1	1
6	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
7	Penata Layanan Operasional	1	-	1
8	Arsiparis Terampil	1	1	2
Total PPPK		10	4	14
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024				
1	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	1	3	4
2	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	2	-	2
Total CPNS		3	3	6
Tenaga Pendukung Individual (TPI)				
1	Analisis Investasi dan Pasar Konstruksi	-	1	1
2	Analisis Pembiayaan	-	1	1
3	Penelaah Kebijakan	1	2	3
4	Pengolah Bahan Standar dan Pedoman	-	1	1
Total TPI		1	5	6
Total Pegawai		26	25	51

I.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan pendidikan dan usia yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin dan status pegawai. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIBM berdasarkan pendidikan dan usia.

Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	S2	8	9	17
2.	S1	17	14	31
3.	D3	-	2	2
4.	SMA	1	-	1
Total		26	25	51

Tabel I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Status Pegawai

No	Pendidikan	PNS	PPPK	PPNP	KI	Jumlah
1.	S2	15	-	-	2	17
2.	S1	10	12	6	3	31
3.	D3	-	1	-	1	2
4.	SMA	-	1	-	-	1
Total		25	14	6	6	51

Tabel I.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	21-25	2	1	3
2.	26-30	1	9	10
3.	31-35	8	6	14
4.	36-40	6	4	10
5.	41-45	2	3	5
6.	46-50	3	1	4
7.	51-55	4	1	5
Total		26	25	51

I.4 Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Direktorat PPIBM dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

I.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Direktorat PPIBM menggunakan alat bantu kerja sarana dan prasarana fisik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun sarana dan prasarana dimaksud diuraikan pada Tabel I.7 di bawah ini:

Tabel I.7 Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Direktorat PPIBM

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)
1	3.05.02.03.005/ 11	AIR CLEANER	2020	1
2	3.05.01.05.015/ 12	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2017	1
3	3.05.01.05.015/ 33	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2019	1
4	3.06.01.02.128/ 16	CAMERA DIGITAL	2019	1
5	3.05.02.06.036/ 3 / T	DISPENSER	2018	1
6	3.05.01.04.005/ 15	FILING CABINET BESI	2017	1
7	3.05.01.04.005/ 70	FILING CABINET BESI	2020	1
8	3.10.01.02.002/ 11	LAP TOP	2023	1
9	3.10.01.02.002/ 7	LAP TOP	2023	1
10	3.05.01.05.048/ 6	LCD PROJECTOR/INFOCUS	2015	1
11	3.05.01.04.001/ 111	LEMARI BESI/METAL	2020	1
12	3.05.01.04.001/ 51	LEMARI BESI/METAL	2018	1
13	3.05.01.04.001/ 84	LEMARI BESI/METAL	2020	1
14	3.05.01.04.001/ 85	LEMARI BESI/METAL	2020	1
15	3.05.01.04.001/ 86	LEMARI BESI/METAL	2020	1
16	3.05.01.04.001/ 123	LEMARI BESI/METAL	2021	1
17	3.06.01.02.061/ 6	LENSA KAMERA	2019	1
18	3.05.02.01.008/ 39	MEJA RAPAT	2021	1
19	3.05.02.01.008/ 42	MEJA RAPAT	2021	1
20	3.05.02.01.026/ 37	NAKAS	2021	1
21	3.10.01.02.003/ 24 / T	NOTE BOOK	2018	1
22	3.10.01.02.003/ 35	NOTE BOOK	2017	1
23	3.10.01.02.003/ 87	NOTE BOOK	2022	1
24	3.10.01.02.003/ 104	NOTE BOOK	2024	1
25	3.10.01.02.003/ 105	NOTE BOOK	2024	1
26	3.10.01.02.001/ 33 / T	P.C UNIT	2015	1
27	3.10.01.02.001/ 318	P.C UNIT	2025	1
28	3.10.01.02.001/ 319	P.C UNIT	2025	1
29	3.10.01.02.001/ 320	P.C UNIT	2025	1
30	3.10.01.02.001/ 321	P.C UNIT	2025	1
31	3.10.01.02.001/ 322	P.C UNIT	2025	1
32	3.10.01.02.001/ 323	P.C UNIT	2025	1
33	3.10.01.02.001/ 324	P.C UNIT	2025	1
34	3.10.01.02.001/ 325	P.C UNIT	2025	1

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)
35	3.10.01.02.001/ 342	P.C UNIT	2025	1
36	3.10.01.02.001/ 339	P.C UNIT	2021	1
37	3.10.01.02.001/ 91 / T	P.C Unit	2018	1
38	3.10.01.02.001/ 24	P.C UNIT	2017	1
39	3.10.01.02.001/ 27	P.C UNIT	2017	1
40	3.10.01.02.001/ 93	P.C UNIT	2018	1
41	3.10.01.02.001/ 94	P.C UNIT	2018	1
42	3.10.01.02.001/ 135	P.C UNIT	2015	1
43	3.10.01.02.001/ 184	P.C UNIT	2015	1
44	3.10.01.02.001/ 147	P.C UNIT	2015	1
45	3.10.01.02.001/ 227	P.C UNIT	2016	1
46	3.10.01.02.001/ 228	P.C UNIT	2016	1
47	3.10.01.02.001/ 247	P.C UNIT	2019	1
48	3.10.01.02.001/ 248	P.C UNIT	2019	1
49	3.10.01.02.001/ 268	P.C UNIT	2020	1
50	3.10.01.02.001/ 269	P.C UNIT	2020	1
51	3.10.01.02.001/ 287	P.C UNIT	2021	1
52	3.10.01.02.001/ 299	P.C UNIT	2021	1
53	3.10.01.02.001/ 335	P.C UNIT	2021	1
54	3.10.01.02.001/ 336	P.C UNIT	2021	1
55	3.10.01.02.001/ 337	P.C UNIT	2021	1
56	3.10.01.02.001/ 338	P.C UNIT	2021	1
57	3.10.01.02.001/ 27	P.C UNIT	2017	1
58	3.10.01.02.001/ 71 / T	P.C Unit	2018	1
59	3.10.01.02.001/ 23	P.C UNIT	2017	1
60	3.10.01.02.001/ 172	P.C UNIT	2015	1
61	3.10.01.02.001/85 / T	P.C Unit	2018	1
62	3.10.02.03.003/ 183	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2019	1
63	3.10.02.03.003/ 248	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2024	1
64	3.10.02.03.003/ 178	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2019	1
65	3.10.02.03.003/ 46	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2015	1
66	3.10.02.03.003/ 76	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2016	1
67	3.10.02.03.003/ 94	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2017	1

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)
68	3.10.02.03.003/ 95	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2017	1
69	3.10.02.03.003/ 96	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2017	1
70	3.10.02.03.003/ 112	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
71	3.10.02.03.003/ 155	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
72	3.10.02.03.003/ 156	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
73	3.10.02.03.003/ 158	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
74	3.10.02.03.003/ 161	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
75	3.10.02.03.003/ 166	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2018	1
76	3.10.02.03.003/ 186	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2019	1
77	3.10.02.03.003/ 198	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2019	1
78	3.10.02.03.003/ 221	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2020	1
79	3.10.02.03.003/ 179	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2019	1
80	3.05.01.04.003/ 31	RAK BESI	2020	1
81	3.05.01.04.003/ 32	RAK BESI	2020	1
82	3.02.01.01.003/ 2	STATION WAGON	2021	1
83	3.05.02.06.002/ 12	TELEVISI	2017	1
84	3.05.02.06.002/ 17	TELEVISI	2017	1
85	3.05.02.06.002/ 3	TELEVISI	2025	1
86	3.05.02.06.002/ 44	TELEVISI	2023	1
TOTAL				86 Unit

Sarana dan prasarana fisik tercatat pada borang di atas belum termasuk alat pendukung kerja meja, kursi, dan sekat partisi dengan status serah terima barang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam proses.

1.4.2 Transformasi Digital

Direktorat PPIBM telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan transformasi digital, diantaranya:

1. Melaksanakan penguatan SPBE pada sistem informasi PPIBM dengan fokus pada penataan dokumentasi dan standardisasi (6 komponen SPBE) untuk mendukung

layanan pemerintahan yang terdigitalisasi, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik, sejalan dengan Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025.

2. Melaksanakan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sektor Bina Marga (SIMONEV Bina Marga) melalui penyesuaian nomenklatur Unit Kerja PPIBM mengikuti nomenklatur Kementerian PU, serta peningkatan fungsi aplikasi dan kualitas data/informasi yang dikelola dalam SIMONEV Bina Marga.
3. Melaksanakan penyesuaian aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (SIPRABU) khusus pada sektor Bina Marga sesuai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha yang mengubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha. Adapun hasil pengembangan aplikasi SIPRABU yang telah dilaksanakan Direktorat PPIBM akan dimigrasikan kembali sebagai bagian dari Aplikasi SIPRABU secara penuh.
4. Seluruh pegawai Direktorat PPIBM telah memanfaatkan aplikasi yang difasilitasi oleh Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum, salah satunya adalah aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), yang memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi pekerjaan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, seluruh pegawai Direktorat PPIBM juga secara aktif menggunakan layanan Microsoft Office 365, seperti melaksanakan rapat melalui aplikasi daring Microsoft Teams, mengerjakan tugas secara kolaboratif serta memungkinkan pimpinan melakukan pengecekan secara langsung melalui OneDrive dan SharePoint, dan berkomunikasi/berkirim pesan serta dokumen melalui Outlook, serta layanan lainnya. Kemudian, Seluruh pegawai Direktorat PPIBM telah menggunakan Aplikasi Bravo dalam Absensi kehadiran serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pengesahan surat dan nota dinas oleh Pimpinan.

I.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIBM adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
2. Pengaturan tentang penyiapan KPBU *Unsolicited* tidak sesuai dengan realisasinya
3. Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU;
4. Terbatasnya kapasitas fiskal untuk pembayaran Proyek KPBU dengan skema *Availability Payment/Ketersediaan Layanan*;
5. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
6. Terdapat beberapa ruas PPJT yang memerlukan perhatian seperti:
 - a. Lamanya proses pemenuhan *financial close* bagi Badan Usaha yang telah memenangkan proses lelang. Hal ini disebabkan karena perpanjangan *financial close* lebih dari satu kali karena belum terpenuhinya persyaratan Calon Kreditur;
 - b. Permintaan reviu PPJT dikarenakan realisasi volume lalu lintas yang jauh dari rencana usaha PPJT.
7. Terjadinya perubahan status Pemrakarsa dari *Unsolicited* menjadi *Solicited* yang menyebabkan kebutuhan pembiayaan pada tahap penyiapan.
8. Ketidakmampuan badan usaha pemrakarsa dalam memenuhi persyaratan kelayakan finansial yang teridentifikasi pada tahap evaluasi kemampuan finansial sehingga berpotensi mengakibatkan pencabutan izin prinsip.

I.6 Sistematika Laporan

Setelah pembahasan Bab I "Pendahuluan" yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat PPIBM, sistematika selanjutnya dari penyajian Laporan Kinerja Direktorat PPIBM adalah sebagai berikut:

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPIBM TA 2025-2029, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM tahun 2025, dan target 2025 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat PPIBM 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, penggunaan sumber daya dan pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PU.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Rencana Strategis ("Renstra") Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Tujuan Direktorat PPIBM merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang akan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan



Gambar II-1 Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)

prasarana jalan dan jembatan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Indikasi total kebutuhan pendanaan untuk target pembangunan infrastruktur PU lima tahun ke depan mencapai Rp1.905,3 triliun, namun anggaran Pemerintah melalui APBN 2024-2029 diperkirakan hanya mampu menutupi 35,63% atau sebesar Rp 678,9 triliun.

Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut, kontribusi signifikan diharapkan datang dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang ditargetkan mencapai Rp651,46 triliun atau 34,19% dari total kebutuhan, di mana porsi terbesarnya adalah untuk sektor bina marga dengan nilai proyek mencapai Rp448,88 triliun. Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga berperan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sektor bina marga, termasuk diantaranya merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sektor bina marga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sektor bina marga, menetapkan sumber pendanaan dan skema pembiayaan proyek infrastruktur sektor bina marga, melaksanakan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur sektor bina marga, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sektor bina marga, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sektor bina marga.

II.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025- 2029 adalah: "Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;

6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

II.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi sektor swasta, baik domestik maupun asing, sangat krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah dan lembaga keuangan domestik dalam membiayai kebutuhan infrastruktur nasional yang masif. Keterlibatan investor asing, khususnya, membawa manfaat ganda: tidak hanya menyediakan tambahan modal segar, tetapi juga mentransfer pengetahuan, teknologi terkini, dan praktik terbaik manajemen proyek. Oleh karena itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menawarkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Bina Marga yang menarik menjadi strategi kunci untuk menutup kesenjangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pemutakhiran tata cara proses penyiapan proyek KPBU Sektor Bina Marga atas usulan badan usaha sangat diperlukan untuk mempersingkat durasi yang saat ini memakan waktu 2,5 hingga 4 tahun yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Penyederhanaan birokrasi, standarisasi dokumen dan pemanfaatan sistem digital yang efisien dapat memberikan ketepatan waktu yang diperlukan untuk studi kelayakan, negosiasi dan proses transaksi, sehingga proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang berlaku.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur sektor bina marga dapat dilakukan melalui skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memungkinkan proyek strategis nasional dilaksanakan lebih cepat tanpa melalui proses lelang KPBU yang kompleks dan memakan waktu. Skema ini memanfaatkan kapasitas finansial, teknis, dan manajerial BUMN yang

seringkali sudah teruji dalam menangani proyek-proyek besar, serta memfasilitasi dukungan pemerintah yang lebih langsung dalam hal penjaminan dan pembiayaan awal. Walaupun demikian, mekanisme penugasan ini tetap memerlukan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan kelayakan finansial proyek jangka panjang.

Strategi kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Strategi agresif diperlukan untuk menarik partisipasi investor asing dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sektor Bina Marga melalui perluasan promosi dan *market sounding* secara internasional, yang secara langsung menysasar pasar modal dan lembaga keuangan global. Langkah ini harus diimbangi dengan penawaran insentif fiskal yang kompetitif, seperti keringanan pajak atau pembebasan bea masuk, serta insentif nonfiskal yang menarik untuk meningkatkan margin keuntungan potensial bagi investor swasta. Secara fundamental, penguatan kepastian hukum dan penciptaan regulasi yang kondusif sangat krusial untuk membangun kepercayaan, memastikan stabilitas perjanjian kontrak jangka panjang, dan melindungi hak-hak investor asing. Harmonisasi kebijakan lintas sektor juga esensial untuk meminimalisasi risiko investasi yang seringkali muncul akibat tumpang tindih peraturan atau birokrasi yang tidak efisien antar kementerian/lembaga terkait. Koordinasi yang baik ini akan menyederhanakan proses perizinan dan pengadaan lahan. Selain itu, penguatan peran lembaga penjaminan akan memberikan jaminan yang diperlukan bagi proyek-proyek strategis bernilai tinggi terhadap risiko politik dan wanprestasi. Adanya jaminan tersebut secara signifikan mengurangi profil risiko proyek, sehingga meningkatkan daya tariknya di mata investor asing yang membutuhkan mitigasi risiko yang kuat. Upaya komprehensif ini secara kolektif menciptakan ekosistem investasi yang stabil dan menarik bagi modal asing, yang sangat dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur nasional.

2. Simplifikasi dan digitalisasi proses penyiapan proyek KPBU Sektor Bina Marga sangat penting untuk mempersingkat durasi yang panjang, dengan mengadopsi standar internasional yang terbukti efisien. Hal ini mencakup penggunaan *platform* digital terpadu untuk pengajuan dokumen dan pemantauan status proyek secara transparan. Selain itu, memperkuat koordinasi antar instansi yang terlibat memungkinkan berbagai prosedur berjalan secara paralel, bukan sekuensial, sehingga menghemat waktu secara signifikan. Proses evaluasi juga perlu dipercepat dan dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas kajian kelayakan, fokus pada aspek kritis, dan memanfaatkan teknologi analisis data. Diperlukan pula pembaruan regulasi yang lebih adaptif untuk mengakomodasi usulan badan usaha (*unsolicited proposals*) yang inovatif. Termasuk di dalamnya adalah penerapan mekanisme *fast track* atau jalur cepat untuk proyek-proyek prioritas strategis nasional yang mendesak. Inisiatif-inisiatif ini secara kolektif menciptakan alur kerja yang lebih gesit dan efisien, sehingga mempercepat pencapaian penutupan finansial proyek.
3. Penetapan skema penugasan yang jelas dan terukur bagi BUMN sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur sektor bina marga berjalan dengan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, sambil tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan. Hal ini memerlukan kriteria penugasan yang transparan, termasuk studi kelayakan yang kuat untuk menghindari beban keuangan yang berlebihan di masa mendatang. Penguatan sinergi antara BUMN dan swasta, baik dalam bentuk kerja sama operasi (*joint venture*) maupun subkontrak, juga menjadi kunci untuk mengoptimalkan keahlian dan sumber daya dari kedua belah pihak. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan akses BUMN terhadap sumber pendanaan jangka panjang, seperti obligasi infrastruktur atau pinjaman dari lembaga keuangan pembangunan, guna mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang komersial jangka pendek. Mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penugasan perlu diperketat melalui audit rutin dan pemantauan kinerja berbasis indikator kunci yang telah

disepakati. Upaya ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target waktu, kualitas, dan biaya yang telah ditetapkan, serta menjaga akuntabilitas dalam penggunaan mandat dan sumber daya publik.

II.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempertajam capaian sasaran (*output*) dalam Rencana Strategis Direktorat PPIBM, kegiatan pokok pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kegiatan teknis yang dilaksanakan unit kerja setingkat eselon III dalam organisasi Direktorat PPIBM dengan rincian sebagai berikut.

Program Dukungan Manajemen.

I. **Sasaran Program** : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

1. **Indikator Kinerja Program** : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI).

- Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)

2. **Indikator Kinerja Program** : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur PU yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan Berkualitas.

Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga (%)

II.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktorat PPIBM menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tujuan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Direktorat PPIBM sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2025 memiliki sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Wujud kegiatan dari sasaran program tersebut yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja adalah penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Berikut Rincian dokumen Perjanjian Kinerja TA 2025 awal dan perubahannya:

II.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	TARGET 2025 (2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%
Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	Rp9.000.000.000

II.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Akhir

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2025
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100%
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp630.291.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp8.330.535.000

II.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2025 mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Juni, Agustus, September, dan Desember. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait indikator kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIBM Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.3 Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM

No	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Tanggal Terbit
1	PK Awal	9.000.000.000	-	Januari 2025
2	PK Revisi Pertama	9.367.430.000	1.455.404.000	Juni 2025
3	PK Revisi Kedua	9.398.901.000	1.455.404.000	Agustus 2025
4	PK Revisi Ketiga	9.398.901.000	1.455.404.000	September 2025
5	PK Akhir	8.960.826.000	1.017.329.000	Desember 2025

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 9.000.000.000

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerje Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	Rp 9.367.430.000

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dilakukan pada Bulan Juni 2025. Pada revisi pertama ini terjadi perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun sehingga menyebabkan perubahan jumlah output target kegiatan dengan rincian perubahan :

1. Perubahan jumlah target output pada Rincian Output (RO) **"Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan"** yang semula tidak terdapat output menjadi 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Perubahan ini dilakukan untuk memfasilitasi pekerjaan rivi u studi kelayakan proyek KPBU Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (Ruas Pekutatan-Mengwi).
2. Perubahan jumlah target output pada Rincian Output RO **"Layanan Pemantauan dan Evaluasi"** yang semula 12 (sembilan) Dokumen menjadi 0 (nol) Dokumen. Pada perubahan Perjanjian Kinerja pertama ini mengakibatkan perubahan nilai pagu anggaran Direktorat PPIBM yaitu naik menjadi sebesar Rp 9.367.430.000,-. Pengurangan output pada RO ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi efisiensi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga pagu anggaran pada RO ini dilakukan pergeseran ke RO Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum	9.398.901.000

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dilakukan pada Bulan Agustus 2025. Adapun revisi kedua ini terdapat penambahan pada nilai pagu anggaran Direktorat PPIBM yaitu naik menjadi sebesar Rp 9.398.901.000,- karena adanya adanya pergeseran pagu anggaran di kegiatan layanan perkantoran. Selain itu, terjadi penambahan output kegiatan pada RO "Layanan Pemantauan dan Evaluasi" yang semula 0 (nol) Dokumen menjadi 3 (tiga) Dokumen.

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Revisi Ketiga

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyilapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina marga	100%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen

Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	630.291.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	8.768.610.000

Revisi Ketiga Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dilakukan pada Bulan September 2025. Adapun revisi ini dilaksanakan dalam rangka perubahan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana sebelumnya Dit. PPIBM hanya terdapat IKK “Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga” dengan target 40% menjadi 2 IKK yaitu “Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga” dengan target 72,16% dan “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina marga” dengan target 100%.

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina marga	100%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	630.291.000
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	8.330.535.000

Revisi Terakhir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dilakukan pada Bulan Desember 2025. Adapun revisi akhir ini terdapat perubahan jumlah pagu anggaran di Dit. PPIBM yang

semula sebesar Rp9.367.430.000,- menjadi Rp8.960.826.000. Perubahan pagu anggaran ini dikarenakan adanya pembukaan pagu blokir Dit. PPIBM dan digeser ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pagu Operasional (Gaji dan Tunjangan) di lingkungan DJPI.

II.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2025-2029 Direktorat PPIBM, serta cara perhitungannya sebagai berikut:

Tabel II.9 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPBM Tahun 2025

Kode Sasaran	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Penilaian	Sumber Data
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SS-06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS-06.01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	(Mendukung indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PU)	1. Indeks Reformasi Birokrasi (50%) 2. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kementerian PU (50%)	Perjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Internal dan Eksternal
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Dilien Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	IKP 5	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Dilien Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)	(Mendukung indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PU) 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan 2. Tingkat Pengelolaan BMN 3. Tingkat Layanan Pembinaan Produk Hukum 4. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tesis Laksana 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI 7. Nilai SAKIP 8. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik	Indikator 1 (10%): 1. Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Perilaian terhadap aspek pengalihan, penyusutan, serana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%): 1. Penulsausahaan: keepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait target penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (10%): 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselamatkan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Tahunan	Internal dan Eksternal

Kode Sasaran	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data	
SK 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan	IKK 4	Tingkat Dukungan Manajemen	Komposit dari Indikator-Indikator Sub-	<p>2. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%</p> <p>3. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%</p> <p>4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%</p> <p>Indikator 4 (10%):</p> <p>1. Tingkat baysan kepegawain yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Indikator 5 (10%):</p> <p>1. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA)</p> <p>Indikator 6 (10%):</p> <p>1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas lamaran BPK RI yang sudah diundaklenguri terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampikan di SIPRL, BPK-RI secara tepat waktu</p> <p>Indikator 7 (10%):</p> <p>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemarPAN-RB</p> <p>Indikator 8 (10%):</p> <p>1. Pensepsi/serfemen positif artikulasian di media (Pensepsi/serfemen positif artikulasian dan volume pemberitaan Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur PU di media</p> <p>2. Pensepsi/serfemen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback</p> <p>Indikator 9 (10%):</p> <p>1. Nilai transformasi digital Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur yang dilakukan oleh PUSDATIN</p> <p>Indikator 10 (10%):</p> <p>1. Pensepsi/serfemen dan pengendalian kepatuhan intern</p> <p>2. Pensepsi/serfemen kepatuhan intern</p> <p>3. Pensepsi/serfemen kepatuhan intern</p>	<p>Perjumlahan dari Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 4</p>	Tahunan	Internal

Kode Sasaran Kode Sasaran Program/ Kode Sasaran Kegiatan	Kode Indikator Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
<p>Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Pembayaan Infrastruktur</p> <p>(7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)</p>	<p>06.05</p>	<p>1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2. Tingkat bayaran kepegawain yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%), 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%).</p>	<p>1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Pentilasan terhadap aspek pengadaan, penyusunan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum</p> <p>Indikator 2 1. Layanan kepegawain yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian Kemendagri-PAN-RB</p> <p>Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDA/TIN</p> <p>Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2</p>	<p>Tahunan</p>	<p>Internal dan Eksternal</p>
<p>SS-06</p> <p>Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya</p>	<p>06.05</p>	<p>Tingkat pemenuhan investasi/pembayaan infrastruktur pekerjasan umum yang didukung sistem, kecukupan dan strategi pembayaan yang efisien dan efektif (%)</p>	<p>Komposit dari indikator-indikator sbb:</p> <p>1. Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikal 100% (20%) 2. Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembayaan Infrastruktur PU (80%)</p> <p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikal 100% Indikator 2 (80%):</p> $\%NPIt = \frac{NPIt}{target\ NPIt}$ <p>Keterangan: %NPIt = Persentase Ketersediaan Investasi atau Pembayaan Infrastruktur PU NPIt = Nilai Realisasi potensi nilai investasi proyek KPBUP/pekerjaan kreatif (Pembayaan + Transaksi (PO)) pada tahun t Target NPIt = Target potensi nilai investasi proyek KPBUP/pembayaan kreatif (Penyasaan + Transaksi (PO)) pada tahun t</p>	<p>Tahunan</p>	<p>Internal dan Eksternal</p>

Kode Sasaran	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SP	Manajemen dan Tugas Lainnya	IKP 11	Tingkat Ketersediaan KPBU jernih/ukur PU yang siap dikeraskan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	Komposit dari Indikator-Indikator sbb: 1. Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% (20%) 2. Realisasi Jumlah Proyek KPBU/Pembayaran Kreatif (Penyajian dan Transaksi) per Tahun yang distalisasi dibagi Jumlah Proyek KPBU/Pembayaran Kreatif (Penyajian dan Transaksi) per Tahun yang ditargetkan dikali 100% (80%).	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100%</p> <p>Indikator 2 (80%):</p> $\%PPKt = \frac{PPKt}{target PPKt}$ <p>Keterangan: %PPKt = Persentase ketersediaan proyek KPBU/pembayaran kreatif infrastruktur PU PPKt = Realisasi jumlah proyek KPBU/pembayaran kreatif (tahap penyajian dan terselenggara daerajaan/akan) infrastruktur SDA, BM, dan CK pada tahun t Target PPKt = Target jumlah proyek KPBU/pembayaran kreatif infrastruktur PU pada tahun t</p> <p>Catatan: - Pembayaran Kreatif adalah berbagai skema pembiayaan selain skema KPBU yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana pemerintah (Penggeseran BLAN, Business to Business, LVC, dll). - Proyek penataan adalah minimal telah disetujui Prastud Kelayakan dan sudah dimulainya proses pemenuhan Readiness Criteria (RC). - Proyek Transaksi/Sisa Dikeraskan/akan adalah Proyek KPBU/pembayaran kreatif yang telah sedang proses Praakuisisi (PO).</p>	Tatapan	Internal dan Eksternal

Kode Sasaran	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Penghitungan	Tipe Pengukuran	Sumber Data
SK 3	Memangkatnya Penyelenggaraan Pembayaran Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas (7766 Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pembayaran Infrastruktur Penerimaan Umum)	IKK 2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan dan Penyediaan Evaluasi Pembayaran Kreatif Infrastruktur Bina Marga (%)	Tertarget Pelaksanaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	<p>-Perkuliahan Realisasi jumlah proyek KPBU/pembayaran kreatif tercapai penyediaan infrastruktur SDA, BM, dan CK + Realisasi jumlah proyek pembayaran kreatif infrastruktur sumber daya air yang siap dikerjasamakan + realisasi jumlah proyek pembayaran kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembayaran kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembayaran kreatif infrastruktur persampahan yang siap dikerjasamakan pada tahun t</p> <p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbd:</p> <p>Indikator (100%):</p> <p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ferganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemanfaatan dan Evaluasi Infrastruktur Bina Marga yang disusun dibandingkan dengan target (40%)</p> <p>2. Jumlah Proyek KPBU/Pembayaran Kreatif Infrastruktur Bina Marga pada Tahap Penyediaan dibandingkan dengan target (60%)</p>	Tahunan	Internal dan Eksternal

Metode pengukuran yang dilakukan dalam menghitung capaian kinerja serta *output* kegiatan yang telah dicapai Direktorat PPIBM merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam Renstra DJPI TA 2025–2028. Berdasarkan metode pengukuran kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2025 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada untuk mendukung tercapainya sasaran program DJPI.

Cascading kinerja Direktorat PPIBM berdasarkan Renstra sebagai berikut:

Tabel II.10 Cascadings Kinerja Direktorat PPIBM

Sasaran Program/Sasaran Kaselompok	Jenis Indikator	Target IKK	Bobot Indikator	R/O	Sasaran	Bobot R/O	
Tingkat Penerimaan Pelaksanaan Perijinan dan Evaluasi Anggaran Kasat Infrastruktur Bina Marga (%)	Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Kredit Infrastruktur Bina Marga	100%	40%	Pelaksanaan dan Penguasaan Perencanaan Infrastruktur Bina Marga NSPK Pembinaan Infrastruktur Bina Marga Laporan Pembinaan dan Evaluasi Pro Studi Kelengkapan Anggaran Bina Marga Dukung Kerja Sama Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Bina Marga Proyek KPIBU Bina dan Jembatan yang Siap Ukhafasurakar	Rekomendasi Kebijakan	30%	
					Rekomendasi Kebijakan	40%	
					Kecepatan	20%	
					Layanan Pemasaran	Layanan	100%
					Tingkat Efektivitas Pemasaran Manajement Risiko	Risiko	20%
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Bina Marga (%)	1. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Kecepatan (20%) 2. Tingkat Layanan Kecepatan yang disediakan "Tipe Waskor (20%) 3. Nilai SAKIP (20%) 4. Tingkat Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Pemasaran Manajement Risiko (20%)	72.16%	20% 20% 20% 20% 20%	Layanan Pemasaran	Layanan	100%	

II.4 Target Kinerja Tahun 2025

Direktorat PPIBM dalam memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan telah merencanakan output indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Target pencapaian sasaran Direktorat PPIBM pada tahun 2025 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.11 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun 2025 Berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2025
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga		100%
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Laporan
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan
	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Slap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga		72.16%
Output	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Sumber: Renstra PPIBM TA 2025-2029

Tabel II.12 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2024 dengan Target Capaian Kinerja TA 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Realisasi PK 2024	Target PK 2025
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	100%	100%
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga*	-	72.16%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga**	25%	100%

Terdapat perbedaan pada Indikator Kinerja Kegiatan antara tahun 2024 dan 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pemograman pada DJPI, dimana pada tahun 2024 IKK ini belum tersedia namun pada tahun 2025 tersedia IKK tersebut.
2. IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan tentang cara menghitung capaian kinerja pada IKK tersebut.

Berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIBM TA 2025-2029, total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIBM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,152,820,000.

Berikut matriks target kinerja dan pendanaan Direktorat PPIBM berdasarkan Renstra TA 2025-2029.

Adapun target pencapaian sasaran Direktorat PPIBM TA 2025 per masing-masing indikator jika dibandingkan antara target kinerja pada Renstra TA 2025-2029 dengan Perjanjian Kinerja TA 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.13 Sandingan Target Kinerja Renstra Direktorat PPIBM TA 2025 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Renstra 2025	Target PK Revisi 2025
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	100%	100%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Laporan	3 Laporan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72.16%	72.16%
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Terdapat perbedaan jumlah target output pada Rincian Output (RO) "**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**" antara target Renstra PPIBM 2025-2029 dengan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir (revisi Desember 2025), dimana RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Renstra PPIBM 2025-2029 ditargetkan 4 (empat) Laporan sedangkan pada Perjanjian Kinerja Revisi Akhir ditargetkan 3 (tiga) Laporan. Penurunan target renstra ke PK revisi terakhir dikarenakan adanya efisiensi anggaran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan sebagai perwujudan



Gambar III-1 Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau

dari amanah yang tertuang dalam Permen PAN/RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat PPIBM telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2025 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan (Laporan Money Bulanan).

Penerapan Evaluasi AKIP tingkat Eselon II Tahun 2024 dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2025, dimana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) bertindak sebagai Evaluator Direktorat PPIBM. Dari hasil pelaksanaan Evaluasi AKIP tersebut, Direktorat PPIBM mendapatkan penilaian "**Memuaskan**" dengan perolehan nilai 86,6%. Dimana nilai tersebut naik dari perolehan pada Tahun 2024 (Evaluasi AKIP tingkat Eselon II Tahun 2023) yaitu sebesar 84,25%. Dari penerapan Evaluasi AKIP tersebut, rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat PPIBM telah menindaklanjutinya. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat PPIBM dijelaskan dalam tabel dibawah. Kenaikan hasil pelaksanaan Evaluasi AKIP dikarenakan komponen Pengukuran Kinerja mengalami kenaikan nilai dari 23,7% ke 24,6% dan juga komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari 19,75% ke 22,25%.

**Tabel III.1 Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2024
Direktorat PPIBM**

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tindak Lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA			
a.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-	-	-
b.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	-	-	-
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-	-	-
2.	PENGUKURAN KINERJA			
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Belum terdapat SOP pengukuran data kinerja dan pengumpulan data kinerja di tingkat unit kerja.	Perlu disusun SOP pengukuran data kinerja dan pengumpulan data kinerja di tingkat unit kerja	Pada tahun 2025 akan disusun SOP pengukuran data kinerja dan pengumpulan data kinerja di tingkat unit kerja
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Belum konsisten dalam menyusun Nota Dinas penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan dari Eselon II ke Eselon I, 2. Pembahasan capaian kinerja dan pembahasan laporan Monev Bulanan belum dilaksanakan secara berkala.	1. Nota Dinas Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan dari Eselon II ke Eselon I dilaksanakan secara bulanan (12 kali) 2. Perlu dilakukan Rapat Pembahasan capaian kinerja secara triwulan (4 TW) dan pembahasan laporan Monev Bulanan setiap bulan (12 kali).	1. Direktorat PPIIJ akan konsisten dalam menyusun Nota Dinas penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan dari Eselon II ke Eselon I 2. Pada tahun 2025 dan seterusnya, Direktorat PPIIJ akan melaksanakan pembahasan capaian kinerja triwulanan dan pembahasan laporan Monev Bulanan setiap bulan secara berkala
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	-	-	-
3.	PELAPORAN KINERJA			
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi bulanan belum sesuai peraturan yang berlaku.	Laporan Monitoring dan evaluasi bulanan yang telah dibandatangani oleh Pimpinan perlu konsisten dalam mencantumkan tanggal pengesahan laporan agar sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018.	Pada tahun 2025 dan selanjutnya, Direktorat PPIIJ akan lebih konsisten dalam mencantumkan tanggal pengesahan Laporan Monev Bulanan sesuai peraturan yang berlaku.
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian	Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan	Dalam laporan kinerja telah menyajikan Benchmarking Kinerja tetapi belum menyajikan perbandingan target dan realisasi	Pada penyusunan Laporan Kinerja berikutnya, Direktorat PPIIJ akan menyajikan

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tindak Lanjut
	Kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/ penyempurnaan.	target dan realisasi Benchmarking Kinerja.		perbandingan target dan realisasi Benchmarking Kinerja dengan instansi lain yang memiliki kesamaan dengan Direktorat PPIJJ.
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan pembahasan capaian kinerja secara berkala 2. Masih terdapat Pejabat/Pegawai Penyusun Lakin yang belum mengikuti bimbingan teknis/workshop/evaluasi kegiatan lainnya yang terkait dengan SAKIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan pembahasan capaian kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan Notulensi dan Dokumentasi rapat sebagai bukti penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada Laporan Monev 2. Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam Penyusun Laporan Kinerja perlu mengikuti bimbingan teknis/workshop/evaluasi kegiatan lainnya yang terkait dengan SAKIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat PPIJJ akan melaksanakan pembahasan capaian kinerja secara berkala yang melibatkan pimpinan unit kerja 2. Pada tahun 2025 dan selanjutnya, pegawai Direktorat PPIJJ yang terlibat dalam penyusun Laporan Kinerja akan mengikuti bimbingan teknis/workshop/evaluasi kegiatan lainnya yang terkait dengan SAKIP.
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	-	
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Tim yang melaksanakan penugasan SAKIP belum seluruhnya memiliki Sertifikat bimtek/sosialisasi/workshop Evaluasi SAKIP	Tim yang melaksanakan penugasan SAKIP perlu dikutsertakan dalam bimtek/sosialisasi/workshop Evaluasi SAKIP	Direktorat PPIJJ akan berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP selaku koordinator SAKIP DJPI terkait bimbingan teknis/workshop/ evaluasi kegiatan lainnya yang terkait dengan SAKIP
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	-	-	-

III.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi melalui sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara periodik dilaporkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas mengenai capaian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja Direktorat PPIBM dilaporkan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan merupakan realisasi kinerja Direktorat PPIBM Tahun Anggaran 2025.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Renstra dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat PPIBM.

Cascading merupakan struktur penurunan program hingga paket kegiatan, struktur penurunan tersebut terdiri atas Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) yang dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) kemudian diturunkan kembali menjadi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK diturun menjadi beberapa Klasifikasi Rincian Out (KRO) yang diturunkan menjadi Rincian Output (RO) dengan Indikator Rincian Output. RO dan Indikator RO diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang dilaksanakan.

Berikut ini uraian Struktur *Cascading* Direktorat PPIBM sesuai target yang harus dicapai berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA tahun 2025:

Tabel III.2 Cascading Direktorat PPIBM Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Jenis Indikator	Target IKK	Bobot Indikator	RO	Satuan	Target			Bobot RO			
						renstra	DIPA	PK				
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan dan Penyajian Evaluasi Pembinaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga (%)	Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	100%	40%	Perencanaan dan Penganggaran Pembinaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100%	30%			
						NSPK Pembinaan Infrastruktur Bina Marga	1		1	40%		
							Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4	3	30%	
									Pra Studi Kelayakan Pembinaan Infrastruktur Bina Marga	1	1	40%
										Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Bina Marga	2	4
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Bina Marga (%)	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kebersihan (20%) 2. Tingkat Layanan Kepegawain yang dilaksanakan Tepat Waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%) 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%)	100%	20%	Layanan Pemerintahan	Layanan		1	1	72,16%		100%	
						20%						
						20%						
						20%						
						20%						

Sumber: Renstra Dit. PPIBM Tahun 2025

Berdasarkan rencana capaian kinerja yang telah dijelaskan pada tabel cascading diatas, berikut tabel pendetailan capaian ouput yang telah direalisasikan oleh Direktorat PPIBM.

Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Direktorat PIIBM Berdasarkan RO

RO	Satuan	Target		Realisasi	Output
		Renstra	DIPA		
Pencapaian dan Peningkatan Pembayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1. Program dan Anggaran 2. Pipeline Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan
NSPK Pembayaan Infrastruktur Bina Marga	NSPK	1	1	1	1. Revisi Permen PU/PR No. 23 Tahun 2021
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	3	3	1. Sistem Manajemen Audit Penyusapan (SMAP) 2. Manajemen Risiko 3. ZI
Pra Studi Kelayakan Pemitayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	1. Revisi Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi 2. Basic Design Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	1. Pendampingan PKKPR Proyek KPBU Pelebaran-Cilecep dan BUUTR 2. Evaluasi Prakteka Badan Usaha pada tahap izin prakarsa; 3. Evaluasi Prakteka Badan Usaha pada tahap izin prakarsa; dan 4. Evaluasi revisi studi kelayakan usulan prakarsa pemerintah.
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kepeguasaan	1	1	1	1. Pendampingan dan monitoring perjanjian dan pengadaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) proyek KPBU Jalan Tol Sembu Selatan-Karawang Barat dan proyek KPBU sektor bina marga lainnya; 2. Dokumen evaluasi pelaksanaan tahapan transaksi (Proyek KPBU Jalan Tol Boyor-Seipongi); 3. Penyusunan laporan bulanan progres proyek KPBU sektor bina marga setiap bulan; Penguatangan dari pemeliharaan website dashboard monitoring dan evaluasi sektor bina marga
Layanan Perantoran	Layanan	1	1	1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Alas pencapaian tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembayaan Infrastruktur Bina Marga mampu memenuhi jumlah target output pada masing-masing Rincian Output (RO) yang telah ditargetkan pada Renstra maupun DIPA TA 2025. "Pra Studi Kelayakan Pembayaan Infrastruktur Bina Marga" mampu melebihi target output yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

III.2.1 Analisis Capaian Kinerja

Direktorat PPIBM mendukung pencapaian Program Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Dalam hal ini, Direktorat PPIBM berkontribusi melalui pelaksanaan Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga dan Program Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Capaian kinerja Direktorat PPIBM pada tahun 2025 berdasarkan PK adalah sebesar 118% dan 116,16%. Rincian Capaian IKK Direktorat PPIBM dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel III.4 Capaian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Jenis Indikator	Target IKK	Bobot Indikator	RO	Setuan	Target			Bobot RO	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (%)	Total Capaian PK (%)
						Raihan	DIPA	PK				
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga (%)	Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	100%	40%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	2	2		30%	2	30%	40%
						1	1		40%	1	80%	
						4	3		30%	3	30%	
						1	1	100%	40%	2	40%	
						2	4		40%	4	40%	
						1	1		20%	1	20%	
						1	1		20%	1	20%	
						1	1		20%	1	20%	
						1	1		20%	1	20%	
						1	1		20%	1	20%	

Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelayanan Pembinaan Infrastruktur Bina Marga (%)	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kebersihan (20%)		20%	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	72,16%	100%	78,62	15,72%	83,62%	118,16%
	2. Tingkat Layanan Kepegawain yang diselesaikan Tepat Waktu (20%)	100%	20%							83,26	16,66%		
	3. Nilai SAKIP (20%)		20%							86,6	17,32%		
	4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%)		20%							86,71	17,34%		
	5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%)		20%							83,89	16,78%		

Pelaksanaan monitoring kinerja realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPIBM Tahun 2025 melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan proyek atau program. Proses ini mencakup analisis data, perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dan identifikasi potensi perbaikan. Berikut disajikan tabel informasi target, realisasi, dan kinerja pada indikator kinerja selama kegiatan TA 2025:

Tabel III.5 Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPIBM TA 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur													
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat (PPIBM)	Target	0.10%	0.30%	6.53%	9.10%	14.22%	14.76%	16.58%	19.58%	22.60%	29.83%	37.06%	72.16%
	Realisasi	0.10%	0.30%	6.63%	9.25%	14.22%	14.88%	16.85%	19.98%	22.85%	29.83%	38.22%	83.82%
	Kinerja	100.00%	100.00%	101.53%	101.65%	100.00%	100.81%	101.63%	102.04%	101.11%	100.00%	103.13%	116.16%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyelapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	Target	0.10%	0.25%	0.30%	0.97%	1.65%	3.60%	6.40%	15.08%	23.65%	27.65%	52.08%	100%
	Realisasi	0.10%	0.25%	0.30%	1.00%	1.70%	3.83%	6.40%	15.74%	25.00%	29.31%	52.65%	118%
	Kinerja	100.00%	100.00%	100.00%	103.09%	103.03%	106.39%	100.00%	104.38%	105.71%	101.65%	101.09%	118.00%

Keterangan nilai capaian kinerja kegiatan berdasarkan Aplikasi e-Monitoring SAKIP

Kinerja <60	61- kinerja <60	70- kinerja <80	90- kinerja <100	Kinerja >100
Sangat Kurang	Kurang	Butuh Perbaikan	Baik	Istimewa

1. IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (PPIBM)

Selama Tahun 2025, akumulasi realisasi capaian indikator kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (Direktorat PPIBM) pada **IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga** adalah sebesar 83,82% dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 72,16% dengan nilai kinerja pencapaian IKK adalah 116,16%.



2. IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga

Selama Tahun 2025, akumulasi realisasi capaian indikator kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIBM) pada **IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga** adalah sebesar 118% dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% dengan nilai kinerja pencapaian IKK adalah 118%.



III.2.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025

Direktorat PPIBM mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pelaksanaan tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dalam bentuk Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Jumlah Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan. Adapun untuk proyek KPBU dengan skema pengembalian tarif (sektor Jalan Tol), Direktorat PPIBM berwenang untuk menyiapkan dokumen perencanaan hingga tahap transaksi. Selanjutnya kewenangan untuk melaksanakan pelelangan berpindah ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan paket pembiayaan KPBU di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) dikoordinasi oleh Direktorat Strategi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan (Direktorat PSSPP). Berdasarkan hasil kesepakatan, capaian paket yang dihitung atas progres pengusahaan proyek KPBU adalah Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS) pada tahap perencanaan dan penyiapan, sedangkan untuk proyek siap dikerjasamakan adalah proyek yang minimal telah melaksanakan persiapan transaksi yaitu *market sounding*.

3.2.2.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Tahap Penyiapan Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Berita Acara Kesepakatan Direktorat PPIBM No. 14/BA/Pb/2025, Direktorat PPIBM mampu merealisasikan sebanyak 12 dari 9 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIBM. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan tahap perencanaan dan penyiapan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIBM pada TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Capaian Proyek KPBU Tahap Penyiapan Sektor Bina Marga TA 2025

TARGET	REALISASI		
JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
9	12	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Perkutatan - Soka - Mengwi)	Penyiapan – Reviu Studi Kelayakan dan Basic Design
		Jalan Tol Pejagan - Cilacap	Penyiapan - Penyusunan Studi Kelayakan dan Readiness Criteria

TARGET		REALISASI	
JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
		Bandung Inter Urban Toll Road	Penyiapan - Penyusunan Studi Kelayakan dan Readiness Criteria
		Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	Penyiapan - Izin Prinsip Prakarsa Penyusunan FS dan Readiness Criteria oleh Badan Usaha
		Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	Penyiapan - Izin Prinsip Prakarsa (Penyusunan FS dan Readiness Criteria oleh Badan Usaha)
		Jalan Tol Bitung – Serpong	Penyiapan - Evaluasi FS
		Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	Penyiapan - Evaluasi FS
		Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Halta	Penyiapan - Penyusunan FS dan Readiness Criteria
		Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	Penyiapan - Prastudi Kelayakan
		Semarang Harbour Toll Road	Penyiapan - Permohonan Perpanjangan Waktu Penyusunan FS dan Readiness Criteria
		Jalan Tol Cikunir-Karawaci	Penyiapan - Penerbitan Surat Pencabutan Izin Prakarsa
		Jalan Tol Semanan-Balaraja	Penyiapan - Penerbitan Surat Pencabutan Izin Prakarsa

Isu-isu pelaksanaan penyiapan Proyek KPBU Sektor Bina Marga.

Meskipun Direktorat PPIBM dapat melebihi capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan, masih terdapat beberapa isu maupun permasalahan dalam pelaksanaan penyiapan diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa progres proyek prakarsa badan usaha yang tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan sampai dengan Desember 2025, diantaranya:
 - a. Diperlukan justifikasi teknis yang lebih komprehensif dan pendalaman pada aspek hukum terkait rencana penyesuaian lokasi-lokasi exit tol dengan kondisi saat ini sudah terdapatnya kegiatan pembebasan lahan pada segmen seksi 2 di sekitar lokasi IC Pekutatan pada saat pengusahaan *unsolicited* terdahulu untuk proyek jalan tol Gilimanuk - Mengwi .
 - b. Penyelesaian studi kelayakan, basic design dan dokumen readiness criteria Jalan Tol Pejagan – Cilacap diproyeksikan akan mengalami keterlambatan, sedangkan waktu fasilitasi hibah KIAT akan berakhir pada Februari 2026.

- c. Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Jalan Tol BIUTR melalui Hibah KIAM ditargetkan selesai pada Februari 2026. Namun demikian, progres saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen basic design dan ROW plan yang disebabkan oleh waktu penentuan trase yang cukup panjang, sehingga diproyeksikan penyelesaian dokumen akan mengalami keterlambatan;
- d. Calon Pemrakarsa Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta menyusun dokumen Studi Kelayakan dan Readiness Criteria selama 6 bulan s.d tanggal 30 April 2026 pukul 16.00 WIB Dit PPIBM akan melakukan monitoring terhadap penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan Readiness Criteria;
- e. Calon pemrakarsa Jalan Tol Caringin-Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin-Cianjur) menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung untuk diserahkan kepada Menteri PU sesuai persetujuan prinsip paling lambat pada tanggal 31 Maret 2026;
- f. Konsorsium Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang-Subang) akan menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum bahwa CCECC mengundurkan diri dan GRBEG akan melanjutkan prakarsa.
- g. Pemrakarsa *Jalan Tol Semarang Harbour Toll Road* perlu melakukan peninjauan mitra baru sebagai tindak lanjut mundurnya PT Waskita Toll Road pada tahun 2022, mengingat PT SMJ tidak memiliki kemampuan sebagai pemrakarsa tunggal;
- h. Belum terdapat bentuk kesepakatan antara PT CMNP sebagai Calon Pemrakarsa dengan BUJT Sedyatmo sehubungan dengan usulan integrasi tarif antara Tol Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (*Elevated*)) dengan Tol Sedyatmo, mengingat Tol Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (*Elevated*)) belum layak jika menggunakan tarif *stand-alone*;
- i. Konsorsium Jalan Tol Cikunir - Karawaci berencana mengubah Lead Konsorsium dengan tambahan anggota baru konsorsium;
- j. Konsorsium PT Alam Sutera Realty menyampaikan surat Nomor 014/ASR/Cor.Leg/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Penyampaian Keputusan Tidak Melanjutkan Proyek. DJPI mengadakan rapat tindak lanjut perusahaan jalan tol Semanan-Balaraja pasca keputusan tidak melanjutkan proyek dari Konsorsium PT ASR. Selanjutnya diterbitkan surat Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan prakarsa jalan tol Semanan-Balaraja tidak dilanjutkan dan izin prakarsa dicabut dan tidak berlaku.

3.2.2.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Siap Dikerjasamakan Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Berita Acara Kesepakatan Direktorat PPIBM No. 14/BA/Pb/2025, Direktorat PPIBM mampu merealisasikan sebanyak 1 dari 1 proyek

yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIBM. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Bina Marga Siap Dikerjasamakan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIBM pada TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga Siap Dikerjasamakan TA 2025

TARGET		REALISASI			
JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)	TAHAPAN
1	Rp36.580.000	1	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp36.580.000	Transaksi

Proyek ini Jalan Tol ini memiliki panjang± 61,5 km dari Sentul Selatan - Karawang Barat yang menghubungkan Sentul Junction dan Karawang Junction. Di Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat terdapat 3 persimpangan yang menghubungkan Tol Bogor Ring Road, Jalan Tol Jakarta - Cikampek Selatan, dan Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

III.3 Analisis Perbandingan Kinerja

III.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga pada Tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Perbandingan Kinerja Direktorat PPIBM dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK (2025-2029) (%)	Realisasi (%)				
						2021	2022	2023	2024	2025
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (PPIBM) (%)	100%	25%	25%	25%	26,38%	118%
		Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur PU yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Elektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Yang Handal dan Berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga (%)	-	-	-	-	-	116,16%

Capaian IKK Direktorat PPIBM dari tahun 2025 melebihi target IKK yang telah ditetapkan yaitu sebesar 118% dari target 100%. Terdapat perbedaan target IKK untuk periode tahun 2020 – 2024 dengan target IKK untuk periode 2025 – 2029. IKK Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2020 – 2024 mempunyai target 25% namun untuk tahun 2025 – 2029 mempunyai target capaian 100%. Perbedaan ini dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan pencapaian target pada metode pengukuran di Renstra PPIBM 2025-2029.

III.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan investasi infrastruktur besar, memproyeksikan kebutuhan sekitar **Rp1.905,3 triliun**, dengan *gap* pendanaan sekitar **Rp753,11 triliun** setelah memperhitungkan APBN/APBD. Fokusnya adalah mendorong skema inovatif seperti KPBU, partisipasi swasta melalui skema baru (misalnya, *land value capture*), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, cerdas, dan inklusif (prioritas: kawasan perkotaan, air bersih, energi baru terbarukan, pengelolaan sampah) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi menuju Indonesia Emas 2045.

Di Renstra PPIBM 2025 -2029 dari *gap* pendanaan sekitar **Rp753,11 triliun untuk semua sektor**, di mana porsi terbesarnya adalah untuk sektor bina marga dengan nilai proyek mencapai **Rp448,88 triliun**.

Pencapaian kinerja realisasi Proyek KPBU di Direktorat PPIBM yang siap dikerjasamakan dari tahun 2025 hingga 2029 telah menunjukkan kemajuan signifikan khususnya sektor jalan dan jembatan. Melalui serangkaian proyek yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIBM, realisasi total capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan sampai dengan tahun 2025 ini terbilang cukup baik. Berikut realisasi capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan periode 2025-2029:

Tabel III.9 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Bina Marga Periode 2025-2029

No	Nama Proyek	Nilai Investasi	Bobot	Total
Tahun 2025				
1	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Perkutatan - Soka - Mengwi)	Rp11.040.000.000.000,00	80%	Rp8.832.000.000.000,00
2	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	Rp24.790.000.000.000,00	80%	Rp19.832.000.000.000,00
3	Bandung Inter Urban Toll Road	Rp10.130.000.000.000,00	70%	Rp7.091.000.000.000,00
4	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	Rp5.473.000.000.000,00	95%	Rp5.199.350.000.000,00
5	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	Rp8.083.000.000.000,00	95%	Rp7.678.850.000.000,00
6	Jalan Tol Bitung - Serpong	Rp7.814.000.000.000,00	80%	Rp6.251.200.000.000,00
7	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	Rp12.835.000.000.000,00	80%	Rp10.268.000.000.000,00
8	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	Rp3.494.000.000.000,00	70%	Rp2.445.800.000.000,00
9	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya	Rp29.480.000.000.000,00	70%	Rp20.636.000.000.000,00

No	Nama Proyek	Nilai Investasi	Bobot	Total
10	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp36.580.000.000.000,00	100%	Rp36.580.000.000.000,00
11	Jalan Tol Cikunir-Karawaci	Rp26.150.000.000.000,00	95%	Rp24.842.500.000.000,00
12	Jalan Tol Semanan-Belaraja	Rp15.520.000.000.000,00	95%	Rp14.752.550.000.000,00
13	Semarang Harbour Toll Road	Rp13.350.000.000.000,00	70%	Rp9.345.000.000.000,00
TOTAL		204.739.000.000.000,00		Rp173.745.700.000.000,00

Dari target lima tahun ke depan yang ditetapkan sebesar Rp448,88 triliun, Direktorat PPIBM telah berhasil merealisasikan investasi senilai Rp173,7 triliun. Capaian ini menunjukkan progres akumulatif sebesar 38,69% terhadap sasaran jangka menengah yang telah dicanangkan.

III.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilaksanakan dengan membandingkan kinerja antara Kementerian PUPR dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses KPBU meskipun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam keterlibatan pelaksanaan proses KPBU, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan LKPP memiliki peran yang penting dan strategis, namun pada instansi tersebut tidak menjadikan capaian KPBU sebagai salah satu target kinerja utama karena lebih berfokus pada pengaturan kebijakan dan koordinasi dibandingkan dengan implementasi langsung proyek KPBU. Sementara itu, Direktorat PPIBM sebagai salah satu Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian PUPR secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU khususnya di sektor jalan dan jembatan sehingga memiliki target kinerja yang lebih berkaitan langsung dengan realisasi proyek KPBU. Berikut beberapa perbandingan kinerja dengan standar nasional yang memiliki kesamaan dengan Direktorat PPIBM.

Tabel III.10 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana strategis	Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	Target 2027	2028	2029
Meningkatkan Penguasaan Nasional dan Tipe Sasaran Utama Pembangunan (Tingkat) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkeadilan, Terukur, dan Lengkap	Pencapaian indikator pembangunan nasional yang mencapai target indikator sasaran RUMAH dan RNP	Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional	Rata-rata Indeks	95,82 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024	78	81	86	90	94
			Indeks Kualitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rata-rata Indeks	N/A	72	76	83	87	91
			Indeks Kinerja Derajat Efisiensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	Rata-rata Indeks	92,67% (Persentase Kinerja Pengadaban Pembangunan Nasional 2024)	77	82	86	91	95
			Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik *	%	N/A	70	72	74	76	78
Meningkatkan Daya Tanggap dan Model Inovasi Pembangunan dalam Melaksanakan Proses Pembangunan Nasional	Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional	Terlaksananya kegiatan persiapan dan koordinasi perencanaan atau isu nasional melalui inovasi serta riset-research kebijakan strategis	Indeks Daya Tanggap Inovasi Pembangunan Nasional	Rata-rata Indeks	N/A	77	78	79	80	82
Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan	Indeks Tata Kelola	Terwujudnya kinerja dari layanan	Indeks Referensi Kinerja	Rata-rata Indeks	81,28	81	82	83	84	85

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Rencana 2024	2025	2026	Target 2027	2028	2029	
Pembangunan Nasional yang Meragukan Rencana yang Turun	Pelaksanaan Pemantauan	peta Kementerian PPN/Bappenas yang berisi, akurat, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Kemampuan PPN/Bappenas	Tingkat Mutu Penerimaan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat (1-5)	N/A	4 (berkurang)	4 (berkurang)	4 (berkurang)	4 (berkurang)	5 (optimal)
			Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas	Nilai indeks	98,49	93	91	96	97	98	
			Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas	Nilai indeks	N/A	17	91	96	90	94	
			Tingkat Kepuasan Internal Kementerian PPN/Bappenas	Tingkat (1-100)	N/A	76	81	85	88	92	

1 Indikator RPJMN 2025-2029

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tabel III.11 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi						
	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman**		(2,53)%	(2,45)% (2,53)%	(2,35)% (2,50)%	(2,32)% (2,50)%	(2,24)% (2,50)%
	a. Kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil						
	1)	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100
2)	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional						
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB**		12,36%	11,71% 13,72%	11,70% 15,06%	12,12% 16,52%	12,86% 18,00%
	a. Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal						
	1)	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB**	10,24%	10,08% 11,34%	10,29% 12,41%	10,75% 13,67%	11,52% 15,00%
	2)	Rasio PNBPN (persen PDB)**	2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%
3)	Waktu penahanan (<i>dwell time</i>) di pelabuhan selama fase impor**	2,90- 2,85 hari	2,85- 2,79 hari	2,79- 2,72 hari	2,72- 2,66 hari	2,66- 2,60 hari	
3.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat						

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara**	86	86,5	87	87,5	88
	a. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas					
	1) Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	85	85,5	86	86,5	87
	2) Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%
	4) Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	100	100	100	100	100
	5) Alokasi TKD untuk infrastruktur**	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
	6) Persentase kinerja hibah daerah**	75%	75%	75%	75%	75%
4.	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik					
	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB**	39,43%	39,13% - 39,85%	39,08% - 39,62%	39,04% - 39,29%	38,55% - 38,64%
	a. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif					
	1) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	3,26 (skala 4)	3,27 (skala 4)	3,28 (skala 4)	3,29 (skala 4)
	2) Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
	3) Indeks pengelolaan aset	3,00 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,40 (skala 4)
	4) Indeks efektivitas kebijakan investasi	100%	100%	100%	100%	100%
	5) Imbal Hasil (Yield) SBN	7,0%	6,6% - 7,2%	6,3% - 7,3%	6,0% - 7,0%	6,0% - 7,0%
5	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.					
	1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
	4)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100
	5)	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
	6)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5
	b. Pencapaian tugas khusus yang efektif						
	1)	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Kementerian keuangan Tahun 2025-2029

Tabel III.12 Target Kinerja LKPP Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional							
1. Meningkatkan kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	1. Meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	1. Indeks Kinerja Pengadaan (IKP)	49.88	50.90	52.33	53.65	60.00
	2. Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2. Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP)	59.96	63.39	67.34	71.43	74.80
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP							

Sumber: Renstra LKPP Tahun 2025-2029

III.4 Analisis Realisasi Anggaran

III.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama tahun 2025, DIPA TA 2025 telah dilakukan revisi sebanyak 7 kali. Mengacu pada DIPA TA 2025 Revisi ke-7 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor SP DIPA-145.08.1.694437/2025 tanggal 2 Desember 2024, total pagu anggaran Direktorat PPIBM Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp8.960.826.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp7.943.497.000,-. Pada tahun 2025, realisasi keuangan Direktorat PPIBM sebesar Rp.6.700.316.000,-.

III.4.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan data *e-Monitoring Online* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 8 Januari 2026, realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga sebesar Rp. 6.700.316.000,- dari total pagu anggaran DIPA sebesar Rp 8.960.826.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 74,77% dan capaian fisik sebesar 100,00% sementara berdasarkan pagu anggaran Efektif sebesar Rp7.943.497.000 capaian keuangan sebesar 84,35% dan capaian fisik sebesar 100,00%.

Berikut rincian capaian realisasi anggaran Direktorat PPIBM Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Pagu anggaran DIPA.

Tabel III.13 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIBM pada Tahun Anggaran 2025

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga		8.960.826	6.700.316	100,00%	74,77%	100,00%	100,00%
7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
7766.ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	697.426	514.402	100,00%	73,76%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	411.963	324.011	100,00%	78,65%	100,00%	100,00%
052.A	Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Bina Marga	285.463	190.390	100,00%	66,70%	100,00%	100,00%
7766.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.192.932	3.396.933	100,00%	81,02%	100,00%	100,00%

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
054.A	Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi)	4.192.932	3.396.933	100,00%	81,02%	100,00%	100,00%
7766.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.378.672	1.089.936	100,00%	79,06%	100,00%	100,00%
051.A	Fasilitasi Pendampingan Proyek KPBU Sektor Bina Marga	440.189	310.772	100,00%	70,60%	100,00%	100,00%
051.B	Riviu Penyiapan Proyek KPBU Sektor Bina Marga	938.483	779.165	100,00%	83,02%	100,00%	100,00%
7766.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)						
7766.AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.045.184	699.239	100,00%	66,90%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	1.045.184	699.239	100,00%	66,90%	100,00%	100,00%
7766.AEE	Kemitraan (Kesepakatan)						
7766.AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	739.761	456.165	100,00%	61,66%	100,00%	100,00%
051.A	Fasilitasi Pelaksanaan Penyiapan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Bina Marga	430.385	228.645	100,00%	52,66%	100,00%	100,00%
052.A	Fasilitasi Pelaksanaan Transaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Bina Marga	309.396	229.520	100,00%	74,18%	100,00%	100,00%
7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
7766.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	276.560	204.869	100,00%	74,08%	100,00%	100,00%
053.A	Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyruapan (SMAP)	200.000	157.749	100,00%	78,87%	100,00%	100,00%
053.B	Pelaksanaan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	26.825	13.034	100,00%	48,59%	100,00%	100,00%
053.C	Pelaksanaan Tata Kelola Zona Integritas Direktorat PPIBM	49.735	34.086	100,00%	68,54%	100,00%	100,00%
7766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
7766.EBA.994	Layanan Perkantoran	630.291	338.771	100,00%	53,75%	100,00%	100,00%
002.N	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ	630.291	338.771	100,00%	53,75%	100,00%	100,00%

Sumber: e-monitoring Kementerian PUPR

Berikut rincian capaian realisasi anggaran Direktorat PPIBM Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Pagu efektif.

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga		7.493.497	6.700.316	100,00%	84,35%	100,00%	100,00%
7766.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
7766.ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	521.180	514.402	100,00%	98,70%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	324.390	324.011	100,00%	99,88%	100,00%	100,00%
052.A	Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Bina Marga	196.790	190.390	100,00%	96,75%	100,00%	100,00%

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
7766.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.192.932	3.396.933	100,00%	81,02%	100,00%	100,00%
054.A	Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi)	4.192.932	3.396.933	100,00%	81,02%	100,00%	100,00%
7766.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.292.140	1.089.936	100,00%	84,35%	100,00%	100,00%
051.A	Fasilitasi Pendampingan Proyek KPBU Sektor Bina Marga	396.955	310.772	100,00%	78,29%	100,00%	100,00%
051.B	Riviu Penyiapan Proyek KPBU Sektor Bina Marga	895.165	779.165	100,00%	87,04%	100,00%	100,00%
7766.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)						
7766.AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	751.784	699.239	100,00%	93,01%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	751.784	699.239	100,00%	93,01%	100,00%	100,00%
7766.AEE	Kemitraan (Kesepakatan)						
7766.AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	519.292	456.165	100,00%	87,84%	100,00%	100,00%
051.A	Fasilitasi Pelaksanaan Penyiapan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Bina Marga	254.513	228.645	100,00%	89,05%	100,00%	100,00%
052.A	Fasilitasi Pelaksanaan Transaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah	264.779	229.520	100,00%	86,86%	100,00%	100,00%

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2025			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
	dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Bina Marga						
7766.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
7766.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	276.560	204.869	100,00%	74,08%	100,00%	100,00%
053.A	Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyruapan (SMAP)	200.000	157.749	100,00%	78,87%	100,00%	100,00%
053.B	Pelaksanaan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	26.825	13.034	100,00%	48,59%	100,00%	100,00%
053.C	Pelaksanaan Tata Kelola Zona Integritas Direktorat PPIBM	49.735	34.086	100,00%	68,54%	100,00%	100,00%
7766.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
7766.EBA.994	Layanan Perkantoran	389.609	338.771	100,00%	86,95%	100,00%	100,00%
002.N	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ	389.609	338.771	100,00%	86,95%	100,00%	100,00%

Sumber: e-monitoring Kementerian PUPR

Keterangan:

1. Berdasarkan *e-Monitoring Online* per tanggal 8 Januari 2026, Pagu DIPA Direktorat PPIBM sebesar Rp 8.960.826.000,- sementara pagu efektif sebesar Rp7.943.497.000,-
2. Berdasarkan *e-Monitoring Online* per tanggal 8 Januari 2026, terdapat beberapa paket kegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 85% yaitu:
 - a. Paket Kegiatan "**Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi)**" dengan realisasi keuangan sebesar 81,02% dari pagu efektif. Keluaran (output) dari kegiatan ini telah tercapai seluruhnya yaitu berupa Studi Kelayakan dan Basic Design & RoW Plan, namun dalam hal realisasi keuangan tidak terserap 100% dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terdapat dana sisa lelang pada paket pekerjaan ini;
 - 2) Adanya addendum pengurangan biaya pelaksanaan FGD dengan mempertimbangkan optimalisasi metode pelaksanaan yang semula tatap muka di hotel menjadi rapat secara hybrid dan pada tahap akhir pelaksanaan kontrak sebagian besar tenaga ahli memfokuskan sumber daya dan waktu untuk penyelesaian analisis dan finalisasi laporan

Efisiensi anggaran diatas, tidak mengurangi substansi, kualitas dan output dari FGD, namun berdampak langsung pada berkurangnya kebutuhan biaya.

- b. Paket Kegiatan "**Fasilitasi Pendampingan Proyek KPBU Sektor Bina Marga**" dengan realisasi keuangan sebesar 78,29% dari pagu efektif dikarenakan tidak terserapnya Belanja Bahan yang disebabkan oleh perubahan beberapa kegiatan rapat yang awalnya direncanakan dilaksanakan secara luring menjadi daring berdasarkan arahan pimpinan. Selain itu, kegiatan survei yang sebelumnya dijadwalkan untuk dilaksanakan lebih dari satu kali, realisasinya dilakukan hanya satu kali dengan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap waktu dan anggaran, sehingga menyisakan alokasi anggaran yang tidak terserap.
- c. Paket Kegiatan "**Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)**" dengan realisasi keuangan sebesar 78,87% dari pagu efektif dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan di luar kantor namun pada realisasinya dilaksanakan didalam kantor serta adanya sisa anggaran kontrak jasa auditor eksternal SMAP.
- d. Paket Kegiatan "**Pelaksanaan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga**" dengan realisasi keuangan sebesar 48,59% dari pagu efektif dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan di luar kantor namun pada realisasinya dilaksanakan didalam kantor.
- e. Paket Kegiatan "**Pelaksanaan Tata Kelola Zona Integritas Direktorat PPIBM**" dengan realisasi keuangan sebesar 68,54% dari pagu efektif dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan di luar kantor namun pada realisasinya dilaksanakan didalam kantor.

Hal ini diakibatkan oleh efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta sisa anggaran lelang pada paket Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Langkah Strategis Kementerian/Lembaga pada Akhir Tahun Anggaran 2025.

Persentase capaian keuangan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga terhadap pagu DIPA sebesar 74,77% lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 98,90% sementara berdasarkan pagu efektif sebesar 84,35% lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 98,90%.

Adapun rencana dan realisasi keuangan serta fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pagu DIPA digambarkan melalui Kurva S sebagai berikut



Gambar III-2 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan



Gambar III-3 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik

Sementara rencana dan realisasi kinerja keuangan serta fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pagu efektif digambarkan melalui Kurva S sebagai berikut



III.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Berikut disajikan perbandingan antara kinerja penyerapan anggaran pada TA 2025 dengan kinerja penyerapan anggaran pada TA 2024.

Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Rincian Output	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025 (Pagu DIPA)		
	Pagu (Ribu Rp)	Realisasi		Pagu (Ribu Rp)	Realisasi	
		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)
Direktorat PPIBM	16.151.412	15.974.598	98,90%	8.960.826	6.700.316	74,77%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.041.785	959.783	92,13%	697.426	514.402	73,76%
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.479.351	3.479.351	100,00%	4.192.932	3.396.933	81,02%
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.413.466	3.377.215	98,60%	1.378.672	1.089.936	79,06%
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.758.790	1.758.586	99,99%	1.045.184	699.239	66,90%
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.553.000	2.524.758	98,89%	739.761	456.165	61,66%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.905.020	2.876.916	99,03%	276.560	204.869	74,08%
Layanan Perkantoran	1.000.000	997.747	99,77%	630.291	338.771	53,75%

Rincian Output	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025 (Pagu Efektif)		
	Pagu (Ribu Rp)	Realisasi		Pagu (Ribu Rp)	Realisasi	
		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)
Direktorat PPIBM	16.151.412	15.974.598	98,90%	7.943.497	6.700.316	84,35%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.041.785	959.783	92,13%	521.180	514.402	98,70%
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.479.351	3.479.351	100,00%	4.192.932	3.396.933	81,02%

Rincian Output	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025 (Pagu Efektif)		
	Pagu (Ribu Rp)	Realisasi		Pagu (Ribu Rp)	Realisasi	
		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.413.466	3.377.215	98,60%	1.292.140	1.089.936	84,35%
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.758.790	1.758.586	99,99%	751.784	699.239	93,01%
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.553.000	2.524.758	98,89%	519.292	456.165	87,84%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.905.020	2.876.916	99,03%	276.560	204.869	74,08%
Layanan Perkantoran	1.000.000	997.747	99,77%	389.609	338.771	86,95%

Penyerapan anggaran Direktorat PPIBM TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24,13% (terhadap pagu DIPA) atau sebesar 14,55% (terhadap pagu efektif) jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2024.

III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sepanjang tahun 2025, Direktorat PPIBM mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Direktorat PPIBM melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan *Self-Blocking* sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Meskipun Direktorat PPIBM melakukan efisiensi anggaran, namun capaian kinerja Direktorat PPIBM mampu melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Selama tahun 2025, terdapat perubahan struktur pegawai yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pegawai di Direktorat PPIBM dengan rincian sebagai berikut:
 - Pegawai yang sedang melakukan karya siswa sebanyak 2 (dua) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil;
 - Pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil;

- Pegawai yang ditugaskan ke unit kerja/unit organisasi lain sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 (enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berkurangnya sumber daya manusia tersebut berdampak kepada penyelesaian target sesuai dengan jadwal namun tidak mengganggu jalannya kinerja organisasi, hal ini dikarenakan adanya arahan pimpinan untuk mengoptimalkan pegawai yang ada sehingga capaian kinerja Direktorat PPIBM mampu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3. Efisiensi pelaksanaan rapat dilakukan oleh Direktorat PPIBM dengan melaksanakan kegiatan rapat melalui aplikasi daring seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dsb,
4. Penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) versi terbaru bagi seluruh pegawai Kementerian PUPR secara optimal, sehingga memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi sehingga dapat mengurangi penggunaan ATK.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

IV.1 Simpulan Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi atas pelaksanaan kinerja Direktorat PPIBM selama Tahun 2025, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II (Unit Kerja). Diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan acuan atau inputan untuk mempermudah perbaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi langkah percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja Direktorat PPIBM.

Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-145.08.1.694437/2025 pertama pada tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 9.000.000.000,-. Selama tahun 2025, DIPA telah mengalami 5 (lima) kali perubahan. Selain itu, dilakukan juga revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga sebanyak 4 (empat) kali perubahan.

Berdasarkan revisi DIPA terakhir, secara keseluruhan anggaran Direktorat PPIBM tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.960.826.000,- dengan total pagu efektif sebesar Rp7.943.497.000,-. Realisasi penyerapan keuangan berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum status 8 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 6.700.316.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 74,77% terhadap total Pagu keseluruhan atau sebesar 84,35% terhadap pagu efektif Direktorat PPIBM. Sedangkan realisasi fisik mampu mencapai target rencana yaitu sebesar 100%.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK): Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga telah terealisasi 116,16% yang setara dengan 83,82% sehingga nilai capaian kinerja Direktorat PPIBM mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72,16% begitu juga dengan Capaian Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK): Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan evaluasi Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga telah terealisasi 118% yang setara dengan 118% sehingga nilai capaian kinerja Direktorat PPIBM mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

IV.1.1 Faktor pendukung Keberhasilan

Capaian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025 mampu melebihi target yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Direktorat PPIBM sebagai berikut:

1. Keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang seimbang bagi seluruh pegawai;
2. Dukungan dan kerjasama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan;
3. Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kerja tahunan yang diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2025;
4. Direktorat PPIBM mampu merealisasikan sebanyak 12 dari 9 proyek dalam tahap penyiapan yang ditargetkan pada Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIBM TA 2025;
5. Capaian Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga mempunyai target 1 namun menghasilkan 2 dokumen yaitu Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi) beserta basic designnya.
6. Direktorat PPIBM secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mulai dari mingguan, bulanan, hingga triwulanan; dan
7. Pada tanggal 24-26 November 2025, Direktorat PPIBM telah melaksanakan Audit Eksternal sebagai rangkaian terakhir pelaksanaan kegiatan Audit *Surveillance* II dalam rangka mempertahankan tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP), dimana sebelumnya Direktorat PPIBM telah berhasil memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 November 2023 dan telah mempertahankan tersertifikasinya SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tahun 2024.

IV.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Selama periode Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat PPIBM diantaranya:

1. Terdapat beberapa proses penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang mundur dari *timeline* yang telah ditargetkan dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan;
2. Terdapat beberapa progres proyek yang ditunda karena masih membutuhkan arahan dari pimpinan;
3. Terjadi perubahan struktur pegawai yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pegawai di Direktorat PPIBM. Secara umum, pencapaian output pekerjaan dapat

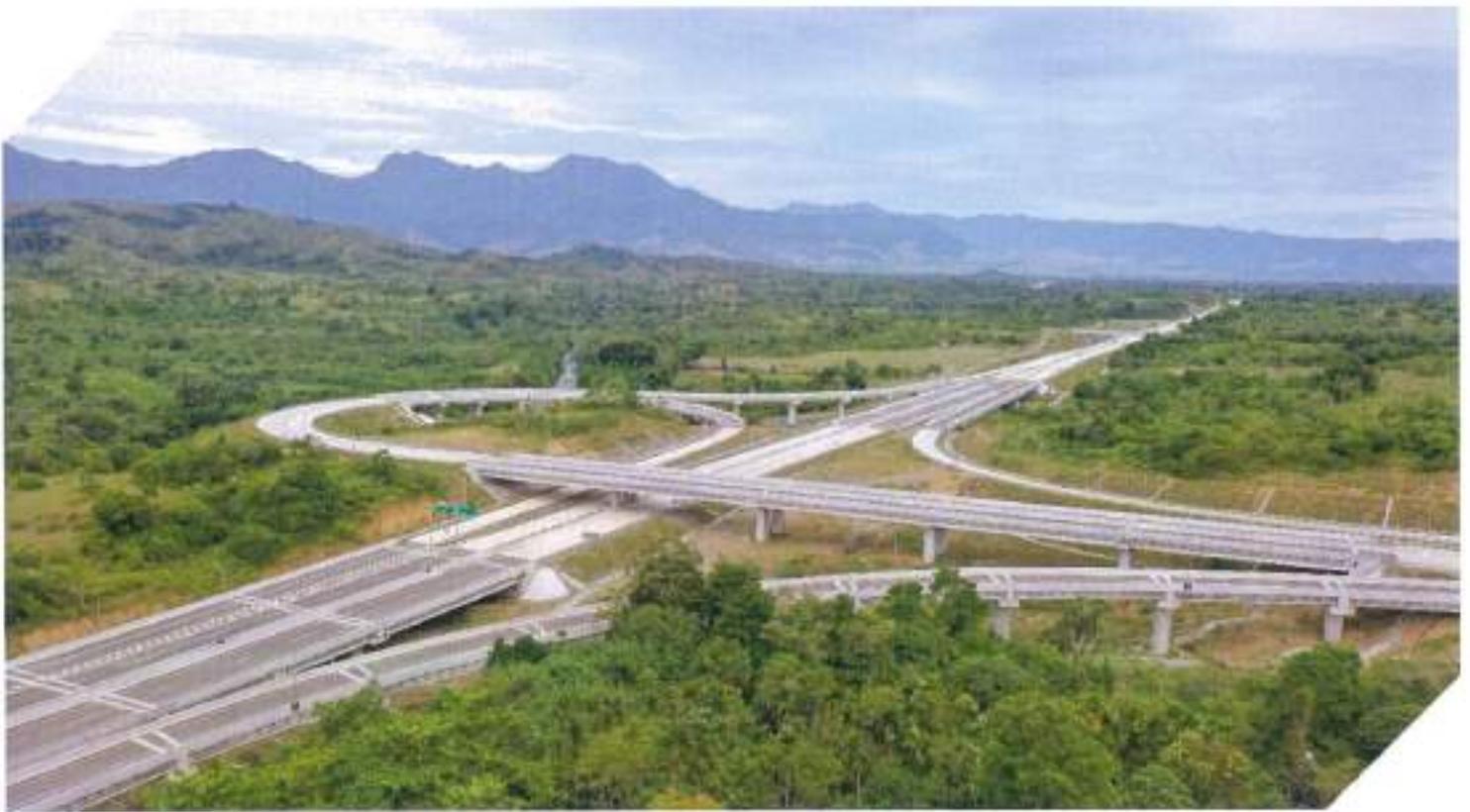
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun karena adanya pengurangan jumlah pegawai menyebabkan *timeline* pelaksanaan pekerjaan harus disesuaikan kembali karena terjadi keterlambatan dan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar kembali target capaian kegiatan. Perubahan ini terjadi dikarenakan adanya pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar serta pegawai yang ditugaskan pada unit organisasi lain;

4. Adanya addendum Proyek Gilimanuk - Mengwi pengurangan biaya pelaksanaan FGD dengan mempertimbangkan optimalisasi metode pelaksanaan yang semula tatap muka di hotel menjadi rapat secara *hybrid* dan pada tahap akhir pelaksanaan kontrak sebagian besar tenaga ahli memfokuskan sumber daya dan waktu untuk penyelesaian analisis dan finalisasi laporan; dan
5. Proses penerbitan surat pencabutan izin prakarsa badan usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Cikunir-Karawaci dan Jalan Tol Semanan-Balaraja.

IV.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Percepatan penyelesaian masalah dan isu terhadap proyek KPBU sektor jalan dan jembatan sesuai rencana target yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran belanja Direktorat PPIBM sehingga sesuai dengan agenda yang telah disusun;
3. Pengusulan Sumber Daya Manusia dan pengadaan BMN baru untuk meningkatkan kinerja Direktorat dengan memperhatikan beban kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
4. Mengimplementasikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam seluruh kegiatan/pekerjaan di Direktorat PPIBM sebagai kelanjutan dalam mempertahankan sertifikat SNI ISO 37001:2016, serta sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam mencegah tindak pidana korupsi.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Wijayanti
Jabatan : Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)		
(2)		
SP. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas		
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga		40%

Kegiatan:
 Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
 Rp 9.000.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 31 Januari 2025
PI. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN



ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Bina Marga Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	Jalan Tol Pejagan Cilacap	Rp24.790.000.000.000,00
	Bandung Infer Urban Toll Road	Rp10.130.000.000.000,00
Penyiapan	Jalan Tol Jambi - Rengat Junction	Rp55.870.000.000.000,00
	Harbour Toll Road Semarang	Rp13.350.000.000.000,00
	Jalan Tol Semarang - Balaraja	Rp15.530.000.000.000,00
	Jalan Tol Cikunir - Karawaci (Elevated)	Rp26.150.000.000.000,00
	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp34.750.000.000.000,00
Transaksi		

JAKARTA, 31 JANUARI 2025

Pt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
 INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN


 ERNA WIJAYANTI



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Wijayanti
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	
SP. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Anggaran
Rp9.367.430.000,00

Jakarta, 2 Juni 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA



ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Bina Marga Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Jalan Tol Gillmanuk - Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi)	Rp25.400.000.000.000,00
	Jalan Tol Pejajagan Cilacap	Rp24.790.000.000.000,00
	Bandung Inter Urban Toll Road	Rp10.130.000.000.000,00
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang-Subang)	Rp5.473.000.000.000,00
	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin - Cianjur)	Rp8.083.000.000.000,00
	Jalan Tol Bitung - Serpong	Rp6.880.000.000.000,00
	Jalan Tol Pluit - Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	Rp12.835.000.000.000,00
Transaksi	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp34.750.000.000.000,00

JAKARTA, 2 JUNI 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 BINA MARGA



ERNA WIJAYANTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Wijayanti
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 12. Agustus 2025

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkualitas	
IKK. Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	40%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp9.398.901.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jakarta, 12 Agustus 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA



ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Bina Marga Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Ruas Perkatatan - Soka - Mengwi)	Rp25,400,000,000,000.00
	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	Rp24,790,000,000,000.00
Penyiapan	Bandung Inter Urban Toll Road	Rp10,130,000,000,000.00
	Jalan Tol Akses Padimbang Extend (Sadang - Subang)	Rp5,473,000,000,000.00
	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin - Cianjur)	Rp8,083,000,000,000.00
	Jalan Tol Bitung - Serpong	Rp6,880,000,000,000.00
	Jalan Tol Pluit - Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	Rp12,835,000,000,000.00
	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	Rp3,494,000,000,000.00
Transaksi	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp34,750,000,000,000.00

JAKARTA, 12 AGUSTUS 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 BINA MARGA


 ERNA WIDAYANTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Wijayanti
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp630.291.000,00
Rp8.768.610.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA



ERNA WIJAYANTI

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	<p>CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2</p>
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	<p>CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Bina Marga yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)</p>

Jakarta, 30 September 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA



ERNA WIJAYANTI

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

USULAN REVISI LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Daftar Proyek KPBU Sektor Bina Marga Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	Jalan Tol Gillimanuk - Mengwi (Ruas Perkutatan - Soka - Mengwi)	Rp 11,040,000,000,000.00
	Jalan Tol Pejagan - Cilacap	Rp 24,790,000,000,000.00
	Bandung Inter Urban Toll Road	Rp 10,130,000,000,000.00
	Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya	Rp 29,480,000,000,000.00
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	Rp 5,473,000,000,000.00
	Jalan Tol Caringin - Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin)	Rp 8,083,000,000,000.00
	Jalan Tol Bitung - Serpong	Rp 7,814,000,000,000.00
	Jalan Tol Pluit Bandara (bagian dari Jalan Tomang - Pluit - Bandara (Elevated))	Rp 12,835,000,000,000.00
	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta*	Rp 3,494,000,000,000.00
	Jalan Tol Layang Cikunir - Karawaci**	Rp 26,150,000,000,000.00
Penyiapan	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang-Kendal)	Rp 13,350,000,000,000.00
	Jalan Tol Semarang-Balaraja**	Rp 15,520,000,000,000.00
	Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat	Rp 36,580,000,000,000.00
Transaksi		

Keterangan

*KPBU dengan skema *unsolicited* dengan status saat ini telah diberikan Surat Pencabutan Izin Prinsip sebagaimana Surat Menteri PU Nomor HK 0101-Mn/484 tanggal 17 Juli 2025

**KPBU dengan skema *unsolicited* dengan status saat ini diusulkan Surat Pencabutan Izin Prakarsa akibat tidak adanya progres penyiapan dokumen dari Pemrakarsa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erna Wijayanti
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehausnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	
(2)	
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72,16%
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	
IKK 1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp630.291.000,00
Rp8.330.535.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA



ERNA WIJAYANTI

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	<p>CARA PENGUKURAN Penjmlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (20%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 (20%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 4 (20%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 (20%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2</p>
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	<p>CARA PENGUKURAN Penjmlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Bina Marga yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga pada Tahap Penyiapan dan Siap Dikerjasamakan dibandingkan dengan target (60%)</p> <p>CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyek tahap Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/ sedang proses menuju Pra Kualifikasi (PQ) Proyek sedang proses menuju PQ minimal telah memiliki Prastudi Kelayakan, sudah memulai proses pemenuhan RC, dan sudah memulai proses penyiapan transaksi.

Jakarta, 24 Desember 2025
**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA**


ERNA WIJAYANTI

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Daftar Proyek KPBU Sektor Bina Marga Tahun 2025

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan		-
	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi (Ruas Perikutan – Soka – Mengwi)	Rp11.040.000.000.000,00
	Jalan Tol Pejagan – Cilacap	Rp24.790.000.000.000,00
	Bandung Inter Urban Toll Road	Rp10.130.000.000.000,00
	Jalan Tol Akses Palimban Extend (Sadang – Subang)	Rp5.473.000.000.000,00
	Jalan Tol Caringin – Cisarua (bagian dari Jalan Tol Caringin – Cianjur)	Rp8.083.000.000.000,00
	Jalan Tol Blung – Serpong	Rp7.814.000.000.000,00
	Jalan Tol Pluit – Bandara (bagian dari Jalan Tol Tomang – Pluit – Bandara (Elevated))	Rp12.635.000.000.000,00
	Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur) – Bandara Soekarno Hatta	Rp3.494.000.000.000,00
	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya	Rp29.480.000.000.000,00
Transeks	Jalan Tol Sentul Selatan – Karawang Barat	Rp30.580.000.000.000,00

Jakarta, 24 Desember 2025

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BINA MARGA


ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA



Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025

Kode Sasaran	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SS-06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS-06.01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Reskewilakerlan Kementerian PU)	1. Indeks Performa Birokrasi (50%) 2. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kementerian PU (50%)		
SP	Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Taktis Lainnya Dijalan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	IKP 5	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Dijalan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretarisan Kementerian PU) 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kebersihan 2. Tingkat Pengelolaan BMN 3. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 4. Tingkat Layanan Pembihsan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI 7. Nilai SAKIP 8. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik 9. Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi 10. Tingkat Kepatuhan Item Unit Organisasi	Perjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%), sbb: Indikator 1 (10%): 1. Rata-rata Nilai Pengawasan Keasrajan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolaan, penyusunan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%): 1. Pencapaian: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RK/BMN: ketepatan waktu penyampaian RK/BMN terkait tanggal penyampaian RK/BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penelepan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP/BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP/BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (10%): 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Tahunan	Internal dan Eksternal

Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025

Kode Sasaran	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Pengukuran	Tipe Pengukuran	Sifat Data
<p>Kode Sasaran</p> <p>Sasaran Strategis Fokus Program Sasaran Kegiatan</p>	<p>Kode Indikator</p> <p>Indikator Kinerja</p>	<p>Indikator Kinerja</p> <p>Tringkat Dukungan Manajerial Direktora Pelaksanaan Pambiyasan Manajemen Bina Pambiyasan</p>	<p>Jenis Indikator</p> <p>Komposit dari Indikator-Indikator Sub</p>	<p>Metode Pengukuran</p> <p>Indikator 4 (100%): 1. Tingkat Efisiensi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu Indikator 5 (100%): 1. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA) Indikator 6 (100%): 1. Efisiensi jumlah rekomendasi atau bantuan BUK VI yang sudah diundangkan/tertassa total jumlah rekomendasi yang diampulkan di SIPPL BPK.FK secara tepat waktu Indikator 7 (100%): 1. Nilai Akumulatif Kinerja sesuai penilaian Kementerian Indikator 8 (100%): 1. Peningkatan jumlah publikasi/kegiatan di media (Presentase pencapaian/kegiatan positif arkebidan dan volume pembinaan Direktorat Jenderal Pambiyasan Infrastruktur PU di media 2. Peningkatan jumlah peserta stakeholder dan/atau stakeholder feedback Indikator 9 (100%): 1. Nilai Persepsi/nilai Digital Direktorat Jenderal Pambiyasan Infrastruktur yang dilakukan oleh PUSDA/IN Indikator 10 (100%): 1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan keputihan inter 2. Peningkatan pengendalian: seputihan inter 3. Peningkatan pencapaian keputihan inter Pengambilan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Persepsi/nilai Keputihan Internal Unit Kerja (Pria dan terdapat aspek pengalihan, penyusunan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. 1. Ayanan keputihan yang dilaksanakan tepat waktu Indikator 3</p>	<p>Tipe Pengukuran</p> <p>Tahunan</p>	<p>Sifat Data</p> <p>Intern</p>

Manual Indikator Kinerja Direktorat PPBM Tahun 2025

Kode Sasaran	Sasaran Kegiatan	Kode Indikator	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Pengukuran	Tipe Perhitungan	Sumber Data
95-08	1.7761 Kegiatan 1. Dukungan Manajerial, Jenderal, Perencanaan, Infeksiologi, Pekerjaan Umum)	IKSS-06.05	Tingkat pemerataan investasi/pembangunan infrastruktur pokok yang didukung sistem, ketahanan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	Komposit dari Indikator Indikator sbb: 1. Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Keapakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dipandang sebagai Target 100% (20%) 2. Tingkat Keunggulan Investasi/Pembangunan Infrastruktur PU (80%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb. Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Ketahanan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dipandang Target 100% Indikator 2 (80%): $\%NPII = \frac{NPII}{target\ NPII}$ Keterangan: %NPII = Persentase Ketidaksihan Investasi atau Pembelian Infrastruktur PU NPII = Nilai Realisasi pointer nilai investasi proyek KPBU/berkegiatan kreatif (Pembelian + Transaksi (PO)) pada tahun t Target NPII = Target pointer nilai investasi, proyek KPBU/pembelian kreatif (Pembelian + Transaksi (PO)) pada tahun t	Tahunan	Internal dan Eksternal
						1. Nilai Akurabilitas Kinerja sesuai peraturan Kementerian RB Indikator 4 1. Nilai Transformasi data Unik yang dilakukan oleh PUSIDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko 72	1. Survei Tingkat Pemertan Hasil Pelayanan Sistem, Ketahanan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dibandingkan Target awal 100%
SIP	Mekanisme Dukungan Manajerial dan Tugas Lainnya	IKS-41	Tingkat Ketersediaan KPI/Infrastruktur PU yang didukung dan didukung	Komposit dari Indikator-Indikator sbb: 1. Survei Tingkat Pemertan Hasil Pelayanan Sistem, Ketahanan dan Strategi	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Pemertan Hasil Pelayanan Sistem, Ketahanan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PU dibandingkan Target awal 100%	Tahunan	Internal dan Eksternal

Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIBM Tahun 2025

Kode Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Kode Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Pributangan	Sumber Data
	sistem, ketelitian, dan akurasi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	<p>Penyenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target aktual 100% (2025);</p> <p>2. Realisasi Jumlah Proyek KPBUPembayaran Kreatif (Pembayaran dan Transaksi per Tahun yang direalisasikan dikali 100% (2025))</p>	<p>Indikator 2 (GR%):</p> $\%PPIK = \frac{PPIK}{\text{target PPIK}}$ <p>Keterangan:</p> <p>%PPIK = Persentase ketersediaan proyek KPBUPembayaran kreatif distruktur PU PPIK = Realisasi jumlah proyek KPBUPembayaran kreatif (tahap penyagar dan terealisasi/dioperasikan) infrastruktur SDA, DM, dan CK serta lainnya target PPIK = Target jumlah proyek KPBUPembayaran kreatif infrastruktur PU pada tahun :</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran kreatif adalah berwujud semua pembiayaan selain skema KPBUP yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari pemerintah kepulauan non pemerintah yang dapat dikelola dengan dana pemerintah (Pengawasan Bulat, Business to Business, LVC, dll) - Proyek pembiayaan adalah minimal telah disetujui Realisasi Kegiatan dan sudah dimulainya proses penanaman Realisasi Output (RO). - Proyek Transaksi/Slip Pelaksanaan adalah Proyek KPBUPembayaran kreatif yang telah sedang proses pelaksanaan (PPI). <p>- PPK adalah Realisasi jumlah proyek KPBUPembayaran kreatif tahap penyagar, infrastruktur SDA, DM, dan CK + Realisasi jumlah pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya yang siap dikersamakan + Realisasi jumlah pembiayaan kreatif infrastruktur air tanah darat yang siap dikersamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur perikanan yang siap dikersamakan pada tahun t</p>		

LAMPIRAN III
BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 26, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110 Telp. 021 72799058

BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR PR0304/B/pb/2026/07

Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga telah disepakati capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya			
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	72.16 %	83.82 %	116.16 %
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang Handal dan Berkualitas			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	100 %	118 %	118 %

2. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

No.	Rincian Output	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	697.426	521.180	514.402	73.76%	98.70%	100%
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.192.932	4.192.932	3.396.933	81.02%	81.02%	100%
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.378.672	1.292.140	1.089.936	79.06%	84.35%	100%

No.	Rincian Output	Pagu DIPA (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)		
					Pagu DIPA	Pagu Efektif	Fisik
4	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	739.761	519.292	456.165	61.66%	87.84%	100%
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.045.184	751.784	699.239	66.90%	93.01%	100%
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	276.540	276.560	204.869	74.08%	74.08%	100%
7	Layanan Perkantoran	630.291	389.609	338.771	53.75%	86.95%	100%
TOTAL		8,960,826	7,943,497	6,700,315	74.77%	84.35%	100%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah I

Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah II

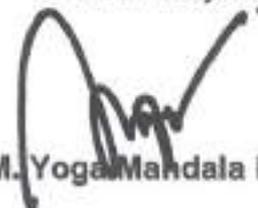
Kepala Subdirektorat
PPIBM Wilayah III



Fadil Arif Nadia



Ira Ariani Chaerunisa



M. Yoga Mandala Putra

Mengetahui,
Direktur



Erna Wijayanti

LAMPIRAN IV PENGHARGAAN





CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to certify that the following organization

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Jalan Basuki Rachis No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

has been audited and found to meet the requirements of

SNI ISO 37001:2016

Anti-Bribery Management Systems - Requirements with guidance for use

Certification scope:

Implementation of road and bridge infrastructure financing

Certificate number	: ABMS - 135
Issue version	: 2023-1
Certificate start date	: 29 November 2023
Certificate expiry date	: 29 November 2026
Initial certificate issue date	: 29 November 2023
Previous certificate expiry date	: N/A
Last recertification audit date	: N/A


Ir. H. Arifin Lambega, MSE
President Director



000412313500MAP004



LSSMAP-004-IDN

This certification is accredited under Komite Akreditasi Nasional (KAN) with accreditation number LSSMAP-004-IDN

This certificate is issued by, and remains the property of, PT Mutu Internasional located in Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Indonesia, which shall be returned or destroyed if requested. Authenticity of this certificate can be verified on www.mutucertification.com or by inquiries to mutu@mutucertification.com. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this certificate is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

LAMPIRAN V
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





Gambar 1 Perandatangani Perjanjian Kerjasama Proyek KPBK Flyover Sitiingau Lauk tanggal 21 Maret 2025



Gambar 2 Kunjungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Rangka Pembahasan Sinergitas Perencanaan Proyek KPBK Jalan Tol Malang-Kepanjen dengan Proyek Strategis di Kabupaten Malang tanggal 13 November 2025



Gambar 3 FGD Identifikasi Risiko dan Potensi Pengembangan Wilayah pada Rencana Jalan Tol Pejagan-Cilacap tanggal 20 November 2025



Gambar 4 FGD Identifikasi Risiko Rencana Jalan Tol BIUTR tanggal 9 Desember 2025



Gambar 5 Kegiatan Pendampingan Survey Primer (Soil Investigation) pada Koridor Alternatif Trase Terpilih Proyek BIUTR



Gambar 6 Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi SIPRABU Sektor Bina Marga tanggal 25 November 2025



Gambar 13 Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Direktorat PPIBM



Gambar 14 Pembahasan Berita Acara Tindak Lanjut Prakarsa Jalan tol Semanan-Baleraja



Gambar 15 Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Awal Dokumen Kajian Awal Jalan Tol Jatimulya (Sepatan Timur)-Bandara Soekarno Hatta



Gambar 16 Rapat Tindak Lanjut Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikurir-Karawaci



Gambar 17 Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penipuan (SMAP) di Lingkungan DitL PPIBM



Gambar 18 Rapat Pembahasan Laporan Akhir Paket Kegiatan reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (Ruas Pekutatan-Soka-Mengwi)

